LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2026



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum Perangkat Daerah:

1. Tujuan;

Dalam pencapaian Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 24 tahun 2007, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019, yang mempunyai tugas:

1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan;
3. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota

Selain tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjalankan fungsi :

1) Koordinasi

Koordinasi penanggulangan bencana dilaksanakan dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut satu diantaranya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. dalam kondisi tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjalankan fungsi komando.

2) **Komando**

Komando dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi yang terakhir adalah peran pelaksana.

3) **Pelaksana**

Pelaksana, terkait dengan pelaksanaan penanggulangan bencana pada semua tahapan bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memerhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, kebijakan pembangunan nasional, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sasaran;

1) Menurunkan Risiko Bencana Provinsi Sumatera Selatan

3. Belanja, Program APBD:

a) Belanja Perangkat Daerah;

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
5	BELANJA DAERAH	22.413.625.597,00	525.846.108,00	2,34
5.1	BELANJA OPERASI	21.559.784.186,00	525.846.108,00	2,43
5.1.01	Belanja Pegawai	13.763.536.114,00	525.846.108,00	5,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.796.248.072,00	0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	853.841.411,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	731.591.411,00	0,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.250.000,00	0,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	105.000.000,00	0,00	0,00
	TOTAL	22.413.625.597,00	525.846.108,00	2,34

b) **Program dan Anggaran APBD;**

No		Program/ Kegiatan	Penyediaan Dana
1		*2*	*3*
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**21.000.000,00**
	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	10.500.000,00
	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.500.000,00
02		**Adminisrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.796.536.114,00**
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.763.536.114,00
	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	33.000.000,00
05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**55.000.000,00**
	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.000.000,00
06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**872.187.961,00**
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80.000.000,00
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	240.670.711,00
	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000,00
	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.000.000,00
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.517.250,00
	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	77.500.000,00
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288.500.000,00
07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**17.250.000,00**
	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.250.000,00
08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.464.898.072,00**

	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	70.000.000,00
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	630.425.512,00
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.764.472.560,00
09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**720.000.000,00**
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	570.000.000,00
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000,00
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**1.028.500.000,00**
	03	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	150.000.000,00
	04	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	878.500.000,00
02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**1.935.420.700,00**
	23	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	420.000.000,00
	24	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	150.000.000,00
	28	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	780.920.700,00
	29	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	584.500.000,00
03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**1.099.332.750,00**
	25	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	35.000.000,00
	28	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	919.332.750,00
	30	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	110.000.000,00
	31	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	35.000.000,00
04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**403.500.000,00**
	06	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	49.000.000,00
	07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	56.000.000,00
	09	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	158.500.000,00
	22	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	105.000.000,00
	23	*Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub* Urusan Bencana Kabupaten/Kota	35.000.000,00
J U M L A H			**22.413.625.597,00**

4. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Renstra) dan Indikator Kinerja Daerah (RPJMD);

Pada RPJMD/RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 selaras dengan Indikator Tujuan/Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 :

1. Indeks Risiko Bencana Provinsi Sumsel
2. Persentase Penanganan Pra Bencana
3. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana
4. Persentase Penanganan Pasca Bencana
5. Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan sampai dengan dinyatakan Sah/Legal

5. Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan kewilayahan (lokasi).

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebar di Provinsi Sumatera Selatan dan 17 Kabupaten/Kota, antara lain sebagai berikut:

- ❖ Penyusunan Kajian Risiko Bencana
- ❖ Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)
- ❖ Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- ❖ Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi
- ❖ Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
- ❖ Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- ❖ Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
- ❖ Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- ❖ Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
- ❖ Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- ❖ Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
- ❖ Penanganan Pasca Bencana Provinsi
- ❖ Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi
- ❖ Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
- ❖ Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang hanya tersebar di Provinsi Sumatera Selatan, antara lain sebagai berikut:

- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- ❖ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- ❖ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- ❖ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- ❖ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- ❖ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ❖ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- ❖ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ❖ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- ❖ Fasilitas Kunjungan Tamu
- ❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- ❖ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gdung Kantor atau Bangunan Lainnya
- ❖ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- ❖ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- ❖ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- ❖ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD dan APBN Tahun Anggaran 2026 sampai dengan triwulan laporan, yang minimal meliputi :

a. Perbandingan antara realisasi (keuangan, fisik dan kinerja) dengan target kinerja program/kegiatan yang tercantum pada DPA Perangkat Daerah dan DIPA APBN :

1. Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBD Provinsi Sumatera Selatan:

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d. bulan Ini	Realisasi s.d. bulan ini	Target s.d Triwulan ini	Realisasi s.d. bulan ini
-1	-2	-3	-4	(5 = 3/2 *100%)	-6	-7
BELANJA DAERAH	**22.413.625.597,00**	**525.846.108,00**	**25,00%**	**2,34%**	**25,00%**	**4,30%**
BELANJA OPERASI	**21.559.784.186,00**	**525.846.108,00**	**25,00%**	**2,43%**	**25,00%**	**4,10%**
Belanja Pegawai	13.763.536.114,00	525.846.108,00	25,00%	5,00%	25,00%	7,50%
Belanja Barang dan Jasa	7.796.248.072,00	0	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%
BELANJA MODAL	**853.841.411,00**	**0**	**25,00%**	**0,00%**	**25,00%**	**0,00%**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	731.591.411,00	0	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.250.000,00	0	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%
Belanja Modal Aset Lainnya	105.000.000,00	0	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%

a) Realisasi Belanja Daerah

Realisasi Keuangan Total Belanja BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Februari Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 525.846.108,00 atau 2,34% dan realisasi fisik 4,30% dst

b) Realisasi Belanja Operasi

Realisasi Keuangan Belanja Operasi BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Februari Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 525.846.108,00 atau 2,43% dan realisasi fisik 4,10% dst

c) Realisasi Belanja Pegawai

Realisasi Keuangan Belanja Pegawai BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Februari Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 525.846.108,00 atau 5,00% dan realisasi fisik 7,50% dst

d) Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Keuangan Belanja Barang dan Jasa BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Februari Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dan realisasi fisik 0,10% dst

e) Realisasi Belanja Modal

Realisasi Keuangan Belanja Modal BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Februari Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dan realisasi fisik 0,83% dst

f) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Keuangan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Februari Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dan realisasi fisik 0,18% dst

g) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Keuangan Belanja Modal Gedung dan Bangunan BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Februari Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dan realisasi fisik 100% dst

h) Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi Keuangan Belanja Modal Aset Lainnya BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Februari Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dan realisasi fisik 0,18% dst

i) Realisasi Belanja Langsung, yang dibedakan dengan klasifikasi capaian realisasi antara lain sebagai berikut :

No	Interval Nilai Realisasi terhadap Target	Kriteria Penilaian Realisasi	Status Realisasi
1	90% ≤ 100%	Tinggi	Hijau
2	66% ≤ 90%	Sedang	Kuning
3	0% ≤ 65%	Rendah	Merah

- ❖ Rendah, Sub Kegiatan dengan realisasi 0% ≤ 65% : 39 Sub Kegiatan
  1) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
  5) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  9) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  11) Fasilitas Kunjungan Tamu
  12) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  13) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  14) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  15) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  16) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  17) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  18) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  19) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
  20) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana provinsi (Per Jenis Bencana)
  21) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
  22) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi
  23) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
  24) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
  25) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
  26) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
  27) Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
  28) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
  29) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
  30) Penanganan Pasca Bencana Provinsi
  31) Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi
  32) Penyusunan , Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
  33) Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota

- ❖ Sedang, Sub Kegiatan dengan realisasi 66% ≤ 90% : 0 Sub Kegiatan

- ❖ Tinggi, Sub Kegiatan dengan realisasi 90% ≤ 100% : 0 Sub Kegiatan

a) Perbandingan antara realisasi dengan target Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang tercantum pada:
   - ➢ Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dan Perubahan Renstra Tahun 2025

Tabel
Indikator Kinerja pada Rencana Strategis RPD BPBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		Target	Target	Target	Target	Target	Target
Meningkatnya Pengelolaan Bencana							
Indeks Resiko Bencana Sumsel	Indeks	130,41	129,78	129,14	128,51	127,88	127,88
Persentase Penanganan Pra Bencana	%	100	100	100	100	100	100
Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100
Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100
Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100	100	100

III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

a) Kendala
- *Tidak ada*

b. Tindak Lanjut yang diperlukan.
- *Tidak ada*

IV. PENUTUP

Demikianlah penjelasan kami mengenai program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan/sub kegiatan Pembangunan APBD Provinsi Sumatera Selatan. Laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk pelaksanaan kegiatan yang sama pada masa yang akan datang, selanjutnya **laporan yang lebih terinci menjadi lampiran** pada dokumen ini.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Februari 2026

KEPALA PELAKSANA,
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

MUHAMMAD IQBAL ALISYAHBANA, S.STP., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198505082003121001

LAMPIRAN

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN BULAN JANUARI TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Tahun 2026						Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat / Pendorong
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERANGAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**												
1.05.01	**PROGRAM PENUNJNAG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**Rp 17.946.872.147**	0,00						
1.05.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Pelaporan**				**Rp 21.000.000**	0,00						
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 10.500.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 10.500.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan**				**Rp 13.796.536.114**	**Rp 525.846.108**						
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya kinerja ASN	Orang	57 Orang	57 Orang	Rp 13.763.536.114	Rp 525.846.108	2,34	2,34	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan	1 laporan	1 laporan	Rp 33.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat**				**Rp 55.000.000**	0,00	0,00	0,00				
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkat kpasitas SDM	Orang	30 Orang	30 Orang	Rp 55.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran Terpenuhi**				**Rp 872.187.961**	0,00						
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya kinerja aparatur	Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 80.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya kinerja aparatur dalam bekerja	Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 240.670.711	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya kinerja aparatur dalam bekerja	Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 60.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran; meningkatnya kenyamanan pegawai dalam bekerja	Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya pelayanan korban bencana	Jenis Surat Kabar	7 Jenis surat kabar dan majalah	7 Jenis surat kabar dan majalah	Rp 25.517.250	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Meningkatnya pelayanan kantor	Laporan	1 laporan	1 laporan	Rp 77.500.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya pelayanan kantor	Laporan	1 laporan	1 laporan	Rp 288.500.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**				**Rp 17.250.000**	0,00						
1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Lapangan Evakuasi Korban Bencana	1 Lapangan Evakuasi Korban Bencana	1 Lapangan Evakuasi Korban Bencana	Rp 17.250.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jasa Penunjang Administrasi Kebutuhan Terpenuhi**				**Rp 2.464.898.072**							
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		- Surat - Lembar	- 500 surat - 6.000 lembar materai Rp.10.000	- 500 surat - 6.000 lembar materai Rp.10.000	Rp 70.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12 Bulan (4 tagihan)	12 Bulan (4 tagihan)	Rp 630.425.512	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya kesehatan pegawai	Orang	1 Orang	1 Orang	Rp 1.764.472.560	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Aset BMD**				**Rp 720.000.000**							
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya kelancaran operasional kantor	Unit	45 Unit kendaraan dinas	45 Unit kendaraan dinas	Rp 570.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya operasional dan kinerja aparatur	Unit	60 Unit	60 Unit	Rp 150.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**					**Rp 4.466.753.450**	0,00						
1.05.03.1.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi bagi warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota**				**Rp 1.028.500.000**	0,00						
1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana Yang Sah dan Legal	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 150.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.01.0004	Sosialisai, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	Orang	500 Orang	500 Orang	Rp 878.500.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada

1.05.03.1.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**- Terlaksananya uji mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana lintas Kabupaten/Kota - Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas - Tersedianya peralatan perlindungan diri bagi keluarga di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota**				**Rp 1.935.420.700**	0,00						
1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memaharni mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	Orang	800 Orang	800 Orang	Rp 420.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 150.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tersedianya peralatan perlindungan diri bagi keluarga di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Keluarga	3.894 Keluarga	3.894 Keluarga	Rp 780.920.700	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terbentuknya Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan Prosedur tetap (SOP) untuk pengendalian operasi yang sah dan legal dengan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 584.500.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**- Terlaksananya Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana - Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman - Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Provinsi**				**Rp 1.099.332.750**	0,00						
1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 35.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	7.025 Orang	7.025 Orang	Rp 919.332.750	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 110.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.03.0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 35.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**- Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam - Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) - Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi - Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi - Tersedianya regulasi di daerah untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana) - Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana) - Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota**				**Rp 403.500.000**	0,00						

1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	Rp 49.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 56.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 158.500.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Rp 105.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kab/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	Rp 35.000.000	0,00	0,00	100,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
						Rp 22.413.625.597	**Rp -**	**2,34**	**2,34**				

Palembang, Februari 2026
KEPALA PELAKSANA,
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

MUHAMMAD IQBAL AVISYAHBANA, S.STP., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19850508 200312 1 001

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2026



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum Perangkat Daerah:

1. Tujuan;

Dalam pencapaian Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 24 tahun 2007, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019, yang mempunyai tugas:

1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan;
3. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota

Selain tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjalankan fungsi :

1) Koordinasi

Koordinasi penanggulangan bencana dilaksanakan dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut satu diantaranya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. dalam kondisi tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjalankan fungsi komando.

2) **Komando**

Komando dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi yang terakhir adalah peran pelaksana.

3) **Pelaksana**

Pelaksana, terkait dengan pelaksanaan penanggulangan bencana pada semua tahapan bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memerhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, kebijakan pembangunan nasional, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sasaran;

1) Menurunkan Risiko Bencana Provinsi Sumatera Selatan

3. Belanja, Program APBD:

a) Belanja Perangkat Daerah;

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
5	**BELANJA DAERAH**	**22.413.625.597,00**	**1.434.908.449,00**	**6.40**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**21.559.784.186,00**	**1.434.908.449,00**	**6.65**
5.1.01	**Belanja Pegawai**	13.763.536.114,00	1.368.158.449	9,94
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	7.796.248.072,00	66.750.000,00	0,85
5.2	**BELANJA MODAL**	**853.841.411,00**	**0**	**0**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	731.591.411,00	0	0
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	17.250.000,00	0	0
5.2.06	**Belanja Modal Aset Lainnya**	105.000.000,00	0	0
	TOTAL	**22.413.625.597,00**	**525.846.108,00**	**6,40**

b) Program dan Anggaran APBD;

No		Program/ Kegiatan	Penyediaan Dana
1		*2*	*3*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**21.000.000,00**
	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	10.500.000,00
	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.500.000,00
02		**Adminisrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.796.536.114,00**
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.763.536.114,00
	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	33.000.000,00
05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**55.000.000,00**
	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.000.000,00
06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**872.187.961,00**
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80.000.000,00
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	240.670.711,00
	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000,00
	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.000.000,00
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.517.250,00
	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	77.500.000,00
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288.500.000,00
07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**17.250.000,00**
	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.250.000,00
08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.464.898.072,00**

	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	70.000.000,00
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	630.425.512,00
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.764.472.560,00
09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**720.000.000,00**
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	570.000.000,00
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000,00
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**1.028.500.000,00**
	03	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	150.000.000,00
	04	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	878.500.000,00
02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**1.935.420.700,00**
	23	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	420.000.000,00
	24	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	150.000.000,00
	28	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	780.920.700,00
	29	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	584.500.000,00
03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**1.099.332.750,00**
	25	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	35.000.000,00
	28	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	919.332.750,00
	30	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	110.000.000,00
	31	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	35.000.000,00
04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**403.500.000,00**
	06	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	49.000.000,00
	07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	56.000.000,00
	09	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	158.500.000,00
	22	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	105.000.000,00
	23	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	35.000.000,00
J U M L A H			**22.413.625.597,00**

4. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Renstra) dan Indikator Kinerja Daerah (RPJMD);

Pada RPJMD/RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 selaras dengan Indikator Tujuan/Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 :

1. Indeks Risiko Bencana Provinsi Sumsel
2. Persentase Penanganan Pra Bencana
3. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana
4. Persentase Penanganan Pasca Bencana
5. Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan sampai dengan dinyatakan Sah/Legal

5. Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan kewilayahan (lokasi).

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebar di Provinsi Sumatera Selatan dan 17 Kabupaten/Kota, antara lain sebagai berikut:

- ❖ Penyusunan Kajian Risiko Bencana
- ❖ Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)
- ❖ Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- ❖ Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi
- ❖ Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
- ❖ Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- ❖ Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
- ❖ Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- ❖ Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
- ❖ Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- ❖ Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
- ❖ Penanganan Pasca Bencana Provinsi
- ❖ Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi
- ❖ Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
- ❖ Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang hanya tersebar di Provinsi Sumatera Selatan, antara lain sebagai berikut:

- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- ❖ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- ❖ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- ❖ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- ❖ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

- ❖ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ❖ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- ❖ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ❖ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- ❖ Fasilitas Kunjungan Tamu
- ❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- ❖ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gdung Kantor atau Bangunan Lainnya
- ❖ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- ❖ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- ❖ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- ❖ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD dan APBN Tahun Anggaran 2026 sampai dengan triwulan laporan, yang minimal meliputi :

a. Perbandingan antara realisasi (keuangan, fisik dan kinerja) dengan target kinerja program/kegiatan yang tercantum pada DPA Perangkat Daerah dan DIPA APBN :

1. Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBD Provinsi Sumatera Selatan:

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d. bulan Ini	Realisasi s.d. bulan ini	Target s.d Triwulan ini	Realisasi s.d. bulan ini
-1	-2	-3	-4	(5 = 3/2 *100%)	-6	-7
BELANJA DAERAH	**22.413.625.597,00**	**1.434.908.449,00**	**25,00%**	**6,40%**	**25,00%**	**8,80%**
BELANJA OPERASI	**21.559.784.186,00**	**1.434.908.449,00**	**25,00%**	**6.65%**	**25,00%**	**8,10%**
Belanja Pegawai	13.763.536.114,00	1.368.158.449	25,00%	9.94%	25,00%	10,50%
Belanja Barang dan Jasa	7.796.248.072,00	66.750.000,00	25,00%	0,85%	25,00%	2,00%
BELANJA MODAL	**853.841.411,00**	**0**	**25,00%**	**0,00%**	**25,00%**	**0,00%**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	731.591.411,00	0	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.250.000,00	0	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%
Belanja Modal Aset Lainnya	105.000.000,00	0	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%

a) Realisasi Belanja Daerah
Realisasi Keuangan Total Belanja BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Februari Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 1.434.908.449,00 atau 6,40% dan realisasi fisik 8,80% dst

b) Realisasi Belanja Operasi
Realisasi Keuangan Belanja Operasi BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Februari Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 1.434.908.449,00 atau 6,65 % dan realisasi fisik 8,10% dst

c) Realisasi Belanja Pegawai
Realisasi Keuangan Belanja Pegawai BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Februari Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 1.368.158.449,00 atau 9,94% dan realisasi fisik 10,50% dst

d) Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Realisasi Keuangan Belanja Barang dan Jasa BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Februari Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 66.750.000,00 atau 0,85% dan realisasi fisik 2,00% dst

e) Realisasi Belanja Modal
Realisasi Keuangan Belanja Modal BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Februari Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dan realisasi fisik 0,00% dst

f) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi Keuangan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Februari Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dan realisasi fisik 0,00% dst

g) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Realisasi Keuangan Belanja Modal Gedung dan Bangunan BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Februari Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dan realisasi fisik 100% dst

h) Belanja Modal Aset Lainnya
Realisasi Keuangan Belanja Modal Aset Lainnya BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Februari Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dan realisasi fisik 0,00% dst

i) Realisasi Belanja Langsung, yang dibedakan dengan klasifikasi capaian realisasi antara lain sebagai berikut :

No	Interval Nilai Realisasi terhadap Target	Kriteria Penilaian Realisasi	Status Realisasi
1	90% ≤ 100%	Tinggi	Hijau
2	66% ≤ 90%	Sedang	Kuning
3	0% ≤ 65%	Rendah	Merah

- ❖ Rendah, Sub Kegiatan dengan realisasi 0% ≤ 65% : 39 Sub Kegiatan
  1) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
  5) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  9) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  11) Fasilitas Kunjungan Tamu
  12) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  13) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  14) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  15) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  16) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  17) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  18) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  19) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
  20) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana provinsi (Per Jenis Bencana)
  21) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
  22) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi
  23) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
  24) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
  25) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
  26) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
  27) Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
  28) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
  29) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
  30) Penanganan Pasca Bencana Provinsi
  31) Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi
  32) Penyusunan , Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
  33) Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota

- ❖ Sedang, Sub Kegiatan dengan realisasi 66% ≤ 90% : 0 Sub Kegiatan

- ❖ Tinggi, Sub Kegiatan dengan realisasi 90% ≤ 100% : 0 Sub Kegiatan

a) Perbandingan antara realisasi dengan target Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang tercantum pada:
   - ➢ Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dan Perubahan Renstra Tahun 2025

Tabel
Indikator Kinerja pada Rencana Strategis RPD BPBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		Target	Target	Target	Target	Target	Target
Meningkatnya Pengelolaan Bencana							
Indeks Resiko Bencana Sumsel	Indeks	130,41	129,78	129,14	128,51	127,88	127,88
Persentase Penanganan Pra Bencana	%	100	100	100	100	100	100
Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100
Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100
Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100	100	100

III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

a) Kendala
- *Tidak ada*

b. Tindak Lanjut yang diperlukan.
- *Tidak ada*

IV. PENUTUP

Demikianlah penjelasan kami mengenai program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan/sub kegiatan Pembangunan APBD Provinsi Sumatera Selatan. Laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk pelaksanaan kegiatan yang sama pada masa yang akan datang, selanjutnya **laporan yang lebih terinci menjadi lampiran** pada dokumen ini.
Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Maret 2026

Plh. KEPALA PELAKSANA,
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

AKSONI,S.E.,M.M
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196909251997031006

LAMPIRAN

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN BULAN JANUARI TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Tahun 2026						Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat / Pendorong
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)				
							(Rp)	(%)					
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERANGAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**												
1.05.01	**PROGRAM PENUNJNAG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**Rp 17.946.872.147**	**Rp 1.434.908.449**						
1.05.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Pelaporan**				**Rp 21.000.000**	0,00						
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 10.500.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 10.500.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan**				**Rp 13.796.536.114**	**Rp 1.368.158.449**						
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya kinerja ASN	Orang	57 Orang	57 Orang	Rp 13.763.536.114	Rp 1.368.158.449	9,92	11,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan	1 laporan	1 laporan	Rp 33.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat**				**Rp 55.000.000**	0,00	0,00	0,00				
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkat kpasitas SDM	Orang	30 Orang	30 Orang	Rp 55.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran Terpenuhi**				**Rp 872.187.961**	0,00						
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya kinerja aparatur	Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 80.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya kinerja aparatur dalam bekerja	Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 240.670.711	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya kinerja aparatur dalam bekerja	Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 60.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran; meningkatnya kenyamanan pegawai dalam bekerja	Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya pelayanan korban bencana	Jenis Surat Kabar	7 Jenis surat kabar dan majalah	7 Jenis surat kabar dan majalah	Rp 25.517.250	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Meningkatnya pelayanan kantor	Laporan	1 laporan	1 laporan	Rp 77.500.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya pelayanan kantor	Laporan	1 laporan	1 laporan	Rp 288.500.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**				**Rp 17.250.000**	0,00						
1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Lapangan Evakuasi Korban Bencana	1 Lapangan Evakuasi Korban Bencana	1 Lapangan Evakuasi Korban Bencana	Rp 17.250.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jasa Penunjang Administrasi Kebutuhan Terpenuhi**				**Rp 2.464.898.072**	**Rp 66.750.000**						
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		- Surat - Lembar	- 500 surat - 6.000 lembar materai Rp.10.000	- 500 surat - 6.000 lembar materai Rp.10.000	Rp 70.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12 Bulan (4 tagihan)	12 Bulan (4 tagihan)	Rp 630.425.512	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya kesehatan pegawai	Orang	37 Orang	37 Orang	Rp 1.764.472.560	Rp 66.750.000	3,78	5,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Aset BMD**				**Rp 720.000.000**							
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya kelancaran operasional kantor	Unit	45 Unit kendaraan dinas	45 Unit kendaraan dinas	Rp 570.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya operasional dan kinerja aparatur	Unit	60 Unit	60 Unit	Rp 150.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**					**Rp 4.466.753.450**	0,00						
1.05.03.1.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**Terlaksananya sosiallsasi, komunikasi, informasi dan edukasi bagi warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota**				**Rp 1.028.500.000**	0,00						
1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana Yang Sah dan Legal	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 150.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.01.0004	Sosialisai, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	Orang	500 Orang	500 Orang	Rp 878.500.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada

1.05.03.1.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**- Terlaksananya uji mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana lintas Kabupaten/Kota - Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas - Tersedianya peralatan perlindungan diri bagi keluarga di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota**				**Rp 1.935.420.700**	0,00						
1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	Orang	800 Orang	800 Orang	Rp 420.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 150.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tersedianya peralatan perlindungan diri bagi keluarga di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Keluarga	3.894 Keluarga	3.894 Keluarga	Rp 780.920.700	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terbentuknya Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan Prosedur tetap (SOP) untuk pengendalian operasi yang sah dan legal dengan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 584.500.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**- Terlaksananya Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana - Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman - Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Provinsi**				**Rp 1.099.332.750**	0,00						
1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 35.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	7.025 Orang	7.025 Orang	Rp 919.332.750	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 110.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.03.0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 35.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**- Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam - Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) - Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi - Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi - Tersedianya regulasi di daerah untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana) - Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana) - Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota**				**Rp 403.500.000**	0,00						

1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	Rp 49.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 56.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 158.500.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Rp 105.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kab/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	Rp 35.000.000	0,00	0,00	100,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
						Rp 22.413.625.597	**Rp 1.434.908.449**	**6,40**	**9,00**				

Palembang, Februari 2026
Plh. KEPALA PELAKSANA,
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

AKSONI, S.E., M.M
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196909251997031006

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2026

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum Perangkat Daerah:

1. Tujuan;

Dalam pencapaian Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 24 tahun 2007, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019, yang mempunyai tugas:

1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan;
3. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota

Selain tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjalankan fungsi :

1) Koordinasi

Koordinasi penanggulangan bencana dilaksanakan dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut satu diantaranya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. dalam kondisi tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjalankan fungsi komando.

2) **Komando**

Komando dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi yang terakhir adalah peran pelaksana.

3) **Pelaksana**

Pelaksana, terkait dengan pelaksanaan penanggulangan bencana pada semua tahapan bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memerhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, kebijakan pembangunan nasional, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sasaran;

1) Menurunkan Risiko Bencana Provinsi Sumatera Selatan

3. Belanja, Program APBD:

a) Belanja Perangkat Daerah;

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
5	**BELANJA DAERAH**	**22.413.625.597,00**	**3.531.887.978,00**	**15,75**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**21.559.784.186,00**	**3.531.887.978,00**	**16,38**
5.1.01	**Belanja Pegawai**	13.763.536.114,00	2.939.952.044,00	21,36
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	7.796.248.072,00	591.935.934,00	7,59
5.2	**BELANJA MODAL**	**853.841.411,00**	**0**	**0**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	731.591.411,00	0	0
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	17.250.000,00	0	0
5.2.06	**Belanja Modal Aset Lainnya**	105.000.000,00	0	0
	TOTAL	**22.413.625.597,00**	**3.531.887.978,00**	**15,75**

b) **Program dan Anggaran APBD;**

No		Program/ Kegiatan	Penyediaan Dana
1		*2*	*3*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**21.000.000,00**
	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	10.500.000,00
	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.500.000,00
02		**Adminisrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.796.536.114,00**
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.763.536.114,00
	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	33.000.000,00
05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**55.000.000,00**
	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.000.000,00
06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**872.187.961,00**
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80.000.000,00
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	240.670.711,00
	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000,00
	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.000.000,00
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.517.250,00
	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	77.500.000,00
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288.500.000,00
07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**17.250.000,00**
	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.250.000,00
08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.464.898.072,00**

	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	70.000.000,00
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	630.425.512,00
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.764.472.560,00
09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**720.000.000,00**
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	570.000.000,00
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000,00
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**1.028.500.000,00**
	03	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	150.000.000,00
	04	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	878.500.000,00
02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**1.935.420.700,00**
	23	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	420.000.000,00
	24	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	150.000.000,00
	28	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	780.920.700,00
	29	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	584.500.000,00
03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**1.099.332.750,00**
	25	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	35.000.000,00
	28	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	919.332.750,00
	30	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	110.000.000,00
	31	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	35.000.000,00
04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**403.500.000,00**
	06	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	49.000.000,00
	07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	56.000.000,00
	09	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	158.500.000,00
	22	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	105.000.000,00
	23	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	35.000.000,00
J U M L A H			**22.413.625.597,00**

4. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Renstra) dan Indikator Kinerja Daerah (RPJMD);

Pada RPJMD/RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 selaras dengan Indikator Tujuan/Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 :

1. Indeks Risiko Bencana Provinsi Sumsel
2. Persentase Penanganan Pra Bencana
3. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana
4. Persentase Penanganan Pasca Bencana
5. Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan sampai dengan dinyatakan Sah/Legal

5. Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan kewilayahan (lokasi).

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebar di Provinsi Sumatera Selatan dan 17 Kabupaten/Kota, antara lain sebagai berikut:

- ❖ Penyusunan Kajian Risiko Bencana
- ❖ Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)
- ❖ Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- ❖ Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi
- ❖ Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
- ❖ Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- ❖ Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
- ❖ Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- ❖ Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
- ❖ Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- ❖ Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
- ❖ Penanganan Pasca Bencana Provinsi
- ❖ Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi
- ❖ Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
- ❖ Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang hanya tersebar di Provinsi Sumatera Selatan, antara lain sebagai berikut:

- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- ❖ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- ❖ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- ❖ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- ❖ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

- ❖ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ❖ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- ❖ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ❖ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- ❖ Fasilitas Kunjungan Tamu
- ❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- ❖ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gdung Kantor atau Bangunan Lainnya
- ❖ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- ❖ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- ❖ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- ❖ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD dan APBN Tahun Anggaran 2026 sampai dengan triwulan laporan, yang minimal meliputi :

a. Perbandingan antara realisasi (keuangan, fisik dan kinerja) dengan target kinerja program/kegiatan yang tercantum pada DPA Perangkat Daerah dan DIPA APBN :

1. Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBD Provinsi Sumatera Selatan:

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d. bulan Ini	Realisasi s.d. bulan ini	Target s.d Triwulan ini	Realisasi s.d. bulan ini
-1	-2	-3	-4	(5 = 3/2 *100%)	-6	-7
BELANJA DAERAH	**22.413.625.597,00**	**3.531.887.978,00**	**25,00%**	**15,75%**	**25,00%**	**17,00%**
BELANJA OPERASI	**21.559.784.186,00**	**3.531.887.978,00**	**25,00%**	**16,38%**	**25,00%**	**18,00%**
Belanja Pegawai	13.763.536.114,00	2.939.952.044,00	25,00%	21,36%	25,00%	23,00%
Belanja Barang dan Jasa	7.796.248.072,00	591.935.934,00	25,00%	7,59%	25,00%	9,00%
BELANJA MODAL	**853.841.411,00**	**0**	**25,00%**	**0,00%**	**25,00%**	**0,00%**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	731.591.411,00	0	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.250.000,00	0	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%
Belanja Modal Aset Lainnya	105.000.000,00	0	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%

a) Realisasi Belanja Daerah
Realisasi Keuangan Total Belanja BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Maret Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 3.531.887.978,00 atau 15,75% dan realisasi fisik 17,00% dst

b) Realisasi Belanja Operasi
Realisasi Keuangan Belanja Operasi BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Februari Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 3.531.887.978,00 atau 16,38 % dan realisasi fisik 18,00% dst

c) Realisasi Belanja Pegawai
Realisasi Keuangan Belanja Pegawai BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Februari Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 2.939.952.044,00 atau 21,36% dan realisasi fisik 23,00% dst

d) Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Realisasi Keuangan Belanja Barang dan Jasa BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Februari Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 591.935.934,00 atau 7,59% dan realisasi fisik 9,00% dst

e) Realisasi Belanja Modal
Realisasi Keuangan Belanja Modal BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Februari Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dan realisasi fisik 0,00% dst

f) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi Keuangan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Februari Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dan realisasi fisik 0,00% dst

g) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Realisasi Keuangan Belanja Modal Gedung dan Bangunan BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Februari Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dan realisasi fisik 100% dst

h) Belanja Modal Aset Lainnya
Realisasi Keuangan Belanja Modal Aset Lainnya BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Februari Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dan realisasi fisik 0,00% dst

i) Realisasi Belanja Langsung, yang dibedakan dengan klasifikasi capaian realisasi antara lain sebagai berikut :

No	Interval Nilai Realisasi terhadap Target	Kriteria Penilaian Realisasi	Status Realisasi
1	90% ≤ 100%	Tinggi	Hijau
2	66% ≤ 90%	Sedang	Kuning
3	0% ≤ 65%	Rendah	Merah

- ❖ Rendah, Sub Kegiatan dengan realisasi 0% ≤ 65% : 39 Sub Kegiatan
  1) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
  5) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  9) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  11) Fasilitas Kunjungan Tamu
  12) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  13) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  14) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  15) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  16) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  17) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  18) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  19) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
  20) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana provinsi (Per Jenis Bencana)
  21) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
  22) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi
  23) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
  24) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
  25) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
  26) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
  27) Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
  28) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
  29) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
  30) Penanganan Pasca Bencana Provinsi
  31) Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi
  32) Penyusunan , Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
  33) Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota

- ❖ Sedang, Sub Kegiatan dengan realisasi 66% ≤ 90% : 0 Sub Kegiatan

- ❖ Tinggi, Sub Kegiatan dengan realisasi 90% ≤ 100% : 0 Sub Kegiatan

a) Perbandingan antara realisasi dengan target Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang tercantum pada:
   - ➢ Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dan Perubahan Renstra Tahun 2025

Tabel
Indikator Kinerja pada Rencana Strategis RPD BPBD Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025 -2029

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		Target	Target	Target	Target	Target	Target
Meningkatnya Pengelolaan Bencana							
Indeks Resiko Bencana Sumsel	Indeks	130,41	129,78	129,14	128,51	127,88	127,88
Persentase Penanganan Pra Bencana	%	100	100	100	100	100	100
Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100
Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100
Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100	100	100

III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

a) Kendala

– *Tidak ada*

b. Tindak Lanjut yang diperlukan.

– *Tidak ada*

IV. PENUTUP

Demikianlah penjelasan kami mengenai program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan/sub kegiatan Pembangunan APBD Provinsi Sumatera Selatan. Laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk pelaksanaan kegiatan yang sama pada masa yang akan datang, selanjutnya **laporan yang lebih terinci menjadi lampiran** pada dokumen ini.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, April 2026

KEPALA PELAKSANA,
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Muhammad Iqbal Alisyahbana,S.STP., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198505082003121001

LAMPIRAN

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN BULAN JANUARI TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Tahun 2026						Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat / Pendorong
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERANGAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**												
1.05.01	**PROGRAM PENUNJNAG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**Rp 17.946.872.147**	**Rp 3.531.887.978**						
1.05.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Pelaporan**				**Rp 21.000.000**	0,00						
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 10.500.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 10.500.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan**				**Rp 13.796.536.114**	**Rp 2.939.952.044**						
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya kinerja ASN	Orang	57 Orang	57 Orang	Rp 13.763.536.114	Rp 2.939.952.044	21,36	23,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan	1 laporan	1 laporan	Rp 33.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat**				**Rp 55.000.000**	0,00	0,00	0,00				
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkat kpasitas SDM	Orang	30 Orang	30 Orang	Rp 55.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran Terpenuhi**				**Rp 872.187.961**	0,00						
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya kinerja aparatur	Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 80.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya kinerja aparatur dalam bekerja	Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 240.670.711	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya kinerja aparatur dalam bekerja	Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 60.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran; meningkatnya kenyamanan pegawai dalam bekerja	Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya pelayanan korban bencana	Jenis Surat Kabar	7 Jenis surat kabar dan majalah	7 Jenis surat kabar dan majalah	Rp 25.517.250	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Meningkatnya pelayanan kantor	Laporan	1 laporan	1 laporan	Rp 77.500.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya pelayanan kantor	Laporan	1 laporan	1 laporan	Rp 288.500.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**				**Rp 17.250.000**	0,00						
1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Lapangan Evakuasi Korban Bencana	1 Lapangan Evakuasi Korban Bencana	1 Lapangan Evakuasi Korban Bencana	Rp 17.250.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jasa Penunjang Administrasi Kebutuhan Terpenuhi**				**Rp 2.464.898.072**	**Rp 144.625.000**						
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		- Surat - Lembar	- 500 surat - 6.000 lembar materai Rp.10.000	- 500 surat - 6.000 lembar materai Rp.10.000	Rp 70.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi.		Tidak Ada
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12 Bulan (4 tagihan)	12 Bulan (4 tagihan)	Rp 630.425.512	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya kesehatan pegawai	Orang	37 Orang	37 Orang	Rp 1.764.472.560	Rp 144.625.000	8,20	10,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Aset BMD**				**Rp 720.000.000**							
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya kelancaran operasional kantor	Unit	45 Unit kendaraan dinas	45 Unit kendaraan dinas	Rp 570.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya operasional dan kinerja aparatur	Unit	60 Unit	60 Unit	Rp 150.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**					**Rp 4.466.753.450**	0,00						
1.05.03.1.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi bagi warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota**				**Rp 1.028.500.000**	0,00						
1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana Yang Sah dan Legal	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 150.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.01.0004	Sosialisai, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	Orang	500 Orang	500 Orang	Rp 878.500.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada

1.05.03.1.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**- Terlaksananya uji mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana lintas Kabupaten/Kota - Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas - Tersedianya peralatan perlindungan diri bagi keluarga di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota**				**Rp 1.935.420.700**	0,00						
1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	Orang	800 Orang	800 Orang	Rp 420.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 150.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tersedianya peralatan perlindungan diri bagi keluarga di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Keluarga	3.894 Keluarga	3.894 Keluarga	Rp 780.920.700	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terbentuknya Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan Prosedur tetap (SOP) untuk pengendalian operasi yang sah dan legal dengan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 584.500.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**- Terlaksananya Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana - Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman - Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Provinsi**				**Rp 1.099.332.750**	**Rp 447.310.934**						
1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 35.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	7.025 Orang	7.025 Orang	Rp 919.332.750	Rp 447.310.934	48,66	50,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 110.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.03.0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 35.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**- Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam - Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) - Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi - Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi - Tersedianya regulasi di daerah untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana) - Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana) - Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota**				**Rp 403.500.000**	0,00						

1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	Rp 49.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 56.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 158.500.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Rp 105.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kab/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	Rp 35.000.000	0,00	0,00	100,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
						Rp 22.413.625.597	Rp 3.531.887.978	15,75	19,00				

Palembang, Maret 2026
KEPALA PELAKSANA,
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Muhammad Iqbal Alisyahbana, S.STP., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198505082003121001

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2026



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum Perangkat Daerah:

1. Tujuan;

Dalam pencapaian Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 24 tahun 2007, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019, yang mempunyai tugas:

1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan;
3. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota

Selain tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjalankan fungsi :

1) Koordinasi

Koordinasi penanggulangan bencana dilaksanakan dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut satu diantaranya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. dalam kondisi tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjalankan fungsi komando.

2) Komando

Komando dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi yang terakhir adalah peran pelaksana.

3) Pelaksana

Pelaksana, terkait dengan pelaksanaan penanggulangan bencana pada semua tahapan bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memerhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, kebijakan pembangunan nasional, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sasaran;

1) Menurunkan Risiko Bencana Provinsi Sumatera Selatan

3. Belanja, Program APBD:

a) Belanja Perangkat Daerah;

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
5	**BELANJA DAERAH**	**22.413.625.597,00**	**8.623.609.050,00**	**38,47**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**21.559.784.186,00**	**8.544.355.050,00**	**39,63**
5.1.01	**Belanja Pegawai**	13.763.536.114,00	6.225.701.422,00	45,23
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	7.796.248.072,00	2.318.653.628,00	29,74
5.2	**BELANJA MODAL**	**853.841.411,00**	**79.254.000,00**	**9,28**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	731.591.411,00	0	0
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	17.250.000,00	0	0
5.2.06	**Belanja Modal Aset Lainnya**	105.000.000,00	0	0
	TOTAL	**22.413.625.597,00**	**8.623.609.050,00**	**38,47**

b) **Program dan Anggaran APBD;**

No		Program/ Kegiatan	Penyediaan Dana
1		*2*	*3*
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**21.000.000,00**
	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	10.500.000,00
	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.500.000,00
02		**Adminisrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.796.536.114,00**
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.763.536.114,00
	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	33.000.000,00
05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**55.000.000,00**
	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.000.000,00
06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**872.187.961,00**
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80.000.000,00
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	240.670.711,00
	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000,00
	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.000.000,00
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.517.250,00
	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	77.500.000,00
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288.500.000,00
07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**17.250.000,00**
	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.250.000,00
08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.464.898.072,00**

	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	70.000.000,00
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	630.425.512,00
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.764.472.560,00
09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**720.000.000,00**
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	570.000.000,00
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000,00
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**1.028.500.000,00**
	03	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	150.000.000,00
	04	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	878.500.000,00
02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**1.935.420.700,00**
	23	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	420.000.000,00
	24	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	150.000.000,00
	28	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	780.920.700,00
	29	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	584.500.000,00
03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**1.099.332.750,00**
	25	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	35.000.000,00
	28	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	919.332.750,00
	30	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	110.000.000,00
	31	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	35.000.000,00
04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**403.500.000,00**
	06	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	49.000.000,00
	07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	56.000.000,00
	09	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	158.500.000,00
	22	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	105.000.000,00
	23	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	35.000.000,00
J U M L A H			**22.413.625.597,00**

4. **Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Renstra) dan Indikator Kinerja Daerah (RPJMD);**

Pada RPJMD/RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 selaras dengan Indikator Tujuan/Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 :

1. Indeks Risiko Bencana Provinsi Sumsel
2. Persentase Penanganan Pra Bencana
3. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana
4. Persentase Penanganan Pasca Bencana
5. Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan sampai dengan dinyatakan Sah/Legal

5. **Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan kewilayahan (lokasi).**

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebar di Provinsi Sumatera Selatan dan 17 Kabupaten/Kota, antara lain sebagai berikut:

- ❖ Penyusunan Kajian Risiko Bencana
- ❖ Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)
- ❖ Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- ❖ Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi
- ❖ Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
- ❖ Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- ❖ Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
- ❖ Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- ❖ Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
- ❖ Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- ❖ Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
- ❖ Penanganan Pasca Bencana Provinsi
- ❖ Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi
- ❖ Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
- ❖ Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang hanya tersebar di Provinsi Sumatera Selatan, antara lain sebagai berikut:

- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- ❖ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- ❖ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- ❖ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- ❖ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

- ❖ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ❖ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- ❖ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ❖ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- ❖ Fasilitas Kunjungan Tamu
- ❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- ❖ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gdung Kantor atau Bangunan Lainnya
- ❖ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- ❖ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- ❖ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- ❖ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD dan APBN Tahun Anggaran 2026 sampai dengan triwulan laporan, yang minimal meliputi :

a. Perbandingan antara realisasi (keuangan, fisik dan kinerja) dengan target kinerja program/kegiatan yang tercantum pada DPA Perangkat Daerah dan DIPA APBN :

1. Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBD Provinsi Sumatera Selatan:

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d. bulan Ini	Realisasi s.d. bulan ini	Target s.d Triwulan ini	Realisasi s.d. bulan ini
-1	-2	-3	-4	(5 = 3/2 *100%)	-6	-7
BELANJA DAERAH	**22.413.625.597,00**	**8.623.609.050,00**	**25,00%**	**38,47**	**25,00%**	**40,00%**
BELANJA OPERASI	**21.559.784.186,00**	**8.544.355.050,00**	**25,00%**	**39,63**	**25,00%**	**41,00%**
Belanja Pegawai	13.763.536.114,00	6.225.701.422,00	25,00%	45,23	25,00%	47,00%
Belanja Barang dan Jasa	7.796.248.072,00	2.318.653.628,00	25,00%	29,74	25,00%	32,00%
BELANJA MODAL	**853.841.411,00**	**79.254.000,00**	**25,00%**	**9,28**	**25,00%**	**12,00%**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	731.591.411,00	0	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.250.000,00	0	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%
Belanja Modal Aset Lainnya	105.000.000,00	0	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%

a) Realisasi Belanja Daerah

Realisasi Keuangan Total Belanja BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Juni Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 8.623.609.050,00 atau 38,47% dan realisasi fisik 40,00% dst

b) Realisasi Belanja Operasi

Realisasi Keuangan Belanja Operasi BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Juni Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 8.544.355.050,00 atau 39.63 % dan realisasi fisik 41,00% dst

c) Realisasi Belanja Pegawai

Realisasi Keuangan Belanja Pegawai BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Juni Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 6.225.701.422,00 atau 45,23% dan realisasi fisik 47,00% dst

d) Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Keuangan Belanja Barang dan Jasa BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Juni Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 2.318.653.628,00 atau 29,74% dan realisasi fisik 32,00% dst

e) Realisasi Belanja Modal

Realisasi Keuangan Belanja Modal BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Juni Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 79.254.000,00 atau 9,28% dan realisasi fisik 12,00% dst

f) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Keuangan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Juni Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dan realisasi fisik 0,00% dst

g) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Keuangan Belanja Modal Gedung dan Bangunan BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Juni Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dan realisasi fisik 100% dst

h) Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi Keuangan Belanja Modal Aset Lainnya BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Juni Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dan realisasi fisik 0,00% dst

i) Realisasi Belanja Langsung, yang dibedakan dengan klasifikasi capaian realisasi antara lain sebagai berikut :

No	Interval Nilai Realisasi terhadap Target	Kriteria Penilaian Realisasi	Status Realisasi
1	90% ≤ 100%	Tinggi	Hijau
2	66% ≤ 90%	Sedang	Kuning
3	0% ≤ 65%	Rendah	Merah

- ❖ Rendah, Sub Kegiatan dengan realisasi 0% ≤ 65% : 39 Sub Kegiatan
  1) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
  5) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  9) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  11) Fasilitas Kunjungan Tamu
  12) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  13) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  14) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  15) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  16) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  17) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  18) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  19) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
  20) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana provinsi (Per Jenis Bencana)
  21) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
  22) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi
  23) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
  24) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
  25) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
  26) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
  27) Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
  28) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
  29) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
  30) Penanganan Pasca Bencana Provinsi
  31) Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi
  32) Penyusunan , Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
  33) Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota

- ❖ Sedang, Sub Kegiatan dengan realisasi 66% ≤ 90% : 0 Sub Kegiatan

- ❖ Tinggi, Sub Kegiatan dengan realisasi 90% ≤ 100% : 0 Sub Kegiatan

a) Perbandingan antara realisasi dengan target Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang tercantum pada:

➢ Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dan Perubahan Renstra Tahun 2025

Tabel
Indikator Kinerja pada Rencana Strategis RPD BPBD Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025 -2029

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		Target	Target	Target	Target	Target	Target
Meningkatnya Pengelolaan Bencana							
Indeks Resiko Bencana Sumsel	Indeks	130,41	129,78	129,14	128,51	127,88	127,88
Persentase Penanganan Pra Bencana	%	100	100	100	100	100	100
Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100
Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100
Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100	100	100

III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

a) Kendala
- *Tidak ada*

b. Tindak Lanjut yang diperlukan.
- *Tidak ada*

IV. PENUTUP

Demikianlah penjelasan kami mengenai program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan/sub kegiatan Pembangunan APBD Provinsi Sumatera Selatan. Laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk pelaksanaan kegiatan yang sama pada masa yang akan datang, selanjutnya **laporan yang lebih terinci menjadi lampiran** pada dokumen ini.
Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Juli 2026

KEPALA PELAKSANA,
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Muhammad Iqbal Alisyahbana,S.STP., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198505082003121001

LAMPIRAN

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN BULAN JUNI TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Tahun 2026						Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat / Pendorong
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERANGAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**												
1.05.01	**PROGRAM PENUNJNAG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**												
1.05.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Pelaporan**				**Rp 17.946.872.147**	**Rp 8.660.549.074**						
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**Rp 21.000.000**	0,00						
1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 10.500.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan**				Rp 10.500.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya kinerja ASN	Orang	57 Orang	57 Orang	**Rp 13.796.536.114**	**Rp 6.747.125.046**						
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan	1 laporan	1 laporan	Rp 13.763.536.114	Rp 6.739.138.046	48,96	51,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat**				Rp 33.000.000	Rp 7.987.000	24,20	26,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkat kpasitas SDM	Orang	30 Orang	30 Orang	**Rp 55.000.000**	**Rp 8.602.900**						
1.05.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran Terpenuhi**				Rp 55.000.000	Rp 8.602.900	15,64	17,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya kinerja aparatur	Paket	1 Paket	1 Paket	**Rp 872.187.961**	**Rp 365.383.905**						
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya kinerja aparatur dalam bekerja	Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 80.000.000	Rp 34.900.620	43,63	45,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya kinerja aparatur dalam bekerja	Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 240.670.711	Rp 119.253.960	49,55	51,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran; meningkatnya kenyamanan pegawai dalam bekerja	Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 60.000.000	Rp 29.981.100	49,97	51,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya pelayanan korban bencana	Jenis Surat Kabar	7 Jenis surat kabar dan majalah	7 Jenis surat kabar dan majalah	Rp 100.000.000	Rp 19.715.820	19,72	21,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Meningkatnya pelayanan kantor	Laporan	1 laporan	1 laporan	Rp 25.517.250	Rp 8.504.000	33,33	35,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya pelayanan kantor	Laporan	1 laporan	1 laporan	Rp 77.500.000	Rp 22.630.000	29,20	31,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**				Rp 288.500.000	Rp 130.398.405	45,20	47,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Lapangan Evakuasi Korban Bencana	1 Lapangan Evakuasi Korban Bencana	1 Lapangan Evakuasi Korban Bencana	**Rp 17.250.000**	0,00						
1.05.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jasa Penunjang Administrasi Kehutuhan Terpenuhi**				Rp 17.250.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		- Surat - Lembar	- 500 surat - 6.000 lembar materai Rp.10.000	- 500 surat - 6.000 lembar materai Rp.10.000	**Rp 2.464.898.072**	**Rp 895.560.697**						
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12 Bulan (4 tagihan)	12 Bulan (4 tagihan)	Rp 70.000.000	Rp 17.327.100	24,75	26,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya kesehatan pegawai	Orang	37 Orang	37 Orang	Rp 630.425.512	Rp 248.766.097	39,46	41,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Aset BMD**				Rp 1.764.472.560	Rp 629.467.500	35,67	37,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya kelancaran operasional kantor	Unit	45 Unit kendaraan dinas	45 Unit kendaraan dinas	**Rp 720.000.000**	**Rp 136.469.592**						
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya operasional dan kinerja aparatur	Unit	60 Unit	60 Unit	Rp 570.000.000	Rp 91.909.775	16,12	18,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**					Rp 150.000.000	Rp 44.559.817	29,71	31,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.03.1.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi bagi warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota**				**Rp 4.466.753.450**							
1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana Yang Sah dan Legal	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**Rp 1.028.500.000**	**Rp 207.780.000**						
1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	Orang	500 Orang	500 Orang	Rp 150.000.000	Rp 35.100.000	23,40	25,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
						Rp 878.500.000	Rp 172.680.000	19,66	21,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada

1.05.03.1.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**- Terlaksananya uji mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana lintas Kabupaten/Kota - Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas - Tersedianya peralatan perlindungan diri bagi keluarga di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota**				**Rp 1.935.420.700**	**Rp 335.358.967**						
1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	Orang	800 Orang	800 Orang	Rp 420.000.000	Rp 279.359.100	66,51	68,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 150.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tersedianya peralatan perlindungan diri bagi keluarga di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Keluarga	3.894 Keluarga	3.894 Keluarga	Rp 780.920.700	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terbentuknya Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan Prosedur tetap (SOP) untuk pengendalian operasi yang sah dan legal dengan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 584.500.000	Rp 55.999.867	9,58	11,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**- Terlaksananya Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana - Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman - Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Provinsi**				**Rp 1.099.332.750**	**Rp 507.406.934**						
1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 35.000.000	Rp 4.151.000	11,86	13,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	7.025 Orang	7.025 Orang	Rp 919.332.750	Rp 452.305.934	49,20	51,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 110.000.000	Rp 50.950.000	46,32	48,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.03.0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 35.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**- Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam - Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) - Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi - Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi - Tersedianya regulasi di daerah untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana) - Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana) - Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota**				**Rp 403.500.000**	**Rp 77.837.500**						

1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	Rp 49.000.000	Rp 34.496.000	70,40	72,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 56.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 158.500.000	Rp 43.341.500	27,34	29,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Rp 105.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kab/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	Rp 35.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
						Rp 22.413.625.597	**Rp 9.281.525.541**	**41,41**	**45,00**				

Palembang, Juni 2026
KEPALA PELAKSANA,
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Muhammad Iqbal Alisyahbana, S.STP., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198505082003121001

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2026

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum Perangkat Daerah:

1. Tujuan;

Dalam pencapaian Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 24 tahun 2007, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019, yang mempunyai tugas:

1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan;
3. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota

Selain tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjalankan fungsi :

1) Koordinasi

Koordinasi penanggulangan bencana dilaksanakan dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut satu diantaranya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. dalam kondisi tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjalankan fungsi komando.

2) **Komando**

Komando dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi yang terakhir adalah peran pelaksana.

3) **Pelaksana**

Pelaksana, terkait dengan pelaksanaan penanggulangan bencana pada semua tahapan bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memerhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, kebijakan pembangunan nasional, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sasaran;

1) Menurunkan Risiko Bencana Provinsi Sumatera Selatan

3. Belanja, Program APBD:

a) Belanja Perangkat Daerah;

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
5	**BELANJA DAERAH**	**22.413.625.597,00**	**5.131.210.904,00**	**22,89**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**21.559.784.186,00**	**5.131.210.904,00**	**23,79**
5.1.01	**Belanja Pegawai**	13.763.536.114,00	3.788.356.534,00	27,52
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	7.796.248.072,00	1.342.854.370,00	17,22
5.2	**BELANJA MODAL**	**853.841.411,00**	**0**	**0**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	731.591.411,00	0	0
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	17.250.000,00	0	0
5.2.06	**Belanja Modal Aset Lainnya**	105.000.000,00	0	0
	TOTAL	**22.413.625.597,00**	**5.131.210.904,00**	**22,89**

b) Program dan Anggaran APBD;

No		Program/ Kegiatan	Penyediaan Dana
1		*2*	*3*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**21.000.000,00**
	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	10.500.000,00
	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.500.000,00
02		**Adminisrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.796.536.114,00**
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.763.536.114,00
	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	33.000.000,00
05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**55.000.000,00**
	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.000.000,00
06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**872.187.961,00**
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80.000.000,00
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	240.670.711,00
	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000,00
	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.000.000,00
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.517.250,00
	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	77.500.000,00
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288.500.000,00
07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**17.250.000,00**
	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.250.000,00
08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.464.898.072,00**

	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	70.000.000,00
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	630.425.512,00
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.764.472.560,00
09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**720.000.000,00**
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	570.000.000,00
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000,00
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**1.028.500.000,00**
	03	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	150.000.000,00
	04	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	878.500.000,00
02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**1.935.420.700,00**
	23	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	420.000.000,00
	24	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	150.000.000,00
	28	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	780.920.700,00
	29	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	584.500.000,00
03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**1.099.332.750,00**
	25	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	35.000.000,00
	28	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	919.332.750,00
	30	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	110.000.000,00
	31	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	35.000.000,00
04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**403.500.000,00**
	06	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	49.000.000,00
	07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	56.000.000,00
	09	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	158.500.000,00
	22	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	105.000.000,00
	23	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	35.000.000,00
J U M L A H			**22.413.625.597,00**

4. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Renstra) dan Indikator Kinerja Daerah (RPJMD);

Pada RPJMD/RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 selaras dengan Indikator Tujuan/Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 :

1. Indeks Risiko Bencana Provinsi Sumsel
2. Persentase Penanganan Pra Bencana
3. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana
4. Persentase Penanganan Pasca Bencana
5. Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan sampai dengan dinyatakan Sah/Legal

5. Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan kewilayahan (lokasi).

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebar di Provinsi Sumatera Selatan dan 17 Kabupaten/Kota, antara lain sebagai berikut:

- ❖ Penyusunan Kajian Risiko Bencana
- ❖ Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)
- ❖ Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- ❖ Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi
- ❖ Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
- ❖ Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- ❖ Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
- ❖ Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- ❖ Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
- ❖ Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- ❖ Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
- ❖ Penanganan Pasca Bencana Provinsi
- ❖ Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi
- ❖ Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
- ❖ Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang hanya tersebar di Provinsi Sumatera Selatan, antara lain sebagai berikut:

- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- ❖ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- ❖ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- ❖ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- ❖ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

- ❖ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ❖ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- ❖ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ❖ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- ❖ Fasilitas Kunjungan Tamu
- ❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- ❖ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gdung Kantor atau Bangunan Lainnya
- ❖ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- ❖ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- ❖ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- ❖ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD dan APBN Tahun Anggaran 2026 sampai dengan triwulan laporan, yang minimal meliputi :

a. Perbandingan antara realisasi (keuangan, fisik dan kinerja) dengan target kinerja program/kegiatan yang tercantum pada DPA Perangkat Daerah dan DIPA APBN :

1. Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBD Provinsi Sumatera Selatan:

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d. bulan Ini	Realisasi s.d. bulan ini	Target s.d Triwulan ini	Realisasi s.d. bulan ini
-1	-2	-3	-4	(5 = 3/2 *100%)	-6	-7
BELANJA DAERAH	**22.413.625.597,00**	**5.131.210.904,00**	**25,00%**	**22,89%**	**25,00%**	**25,00%**
BELANJA OPERASI	**21.559.784.186,00**	**5.131.210.904,00**	**25,00%**	**23,79%**	**25,00%**	**25,00%**
Belanja Pegawai	13.763.536.114,00	3.788.356.534,00	25,00%	27,52%	25,00%	30,00%
Belanja Barang dan Jasa	7.796.248.072,00	1.342.854.370,00	25,00%	17,22%	25,00%	20,00%
BELANJA MODAL	**853.841.411,00**	**0**	**25,00%**	**0,00%**	**25,00%**	**0,00%**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	731.591.411,00	0	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.250.000,00	0	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%
Belanja Modal Aset Lainnya	105.000.000,00	0	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%

a) Realisasi Belanja Daerah
Realisasi Keuangan Total Belanja BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Maret Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 5.131.210.904,00 atau 22,89 % dan realisasi fisik 25,00% dst

b) Realisasi Belanja Operasi
Realisasi Keuangan Belanja Operasi BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Februari Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 5.131.210.904,00 atau 23,79 % dan realisasi fisik 25,00% dst

c) Realisasi Belanja Pegawai
Realisasi Keuangan Belanja Pegawai BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Februari Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 3.788.356.114,00 atau 27,52 % dan realisasi fisik 30,00% dst

d) Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Realisasi Keuangan Belanja Barang dan Jasa BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Februari Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 1.342.854.370,00 atau 17,22% dan realisasi fisik 20,00% dst

e) Realisasi Belanja Modal
Realisasi Keuangan Belanja Modal BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Februari Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dan realisasi fisik 0,00% dst

f) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi Keuangan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Februari Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dan realisasi fisik 0,00% dst

g) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Realisasi Keuangan Belanja Modal Gedung dan Bangunan BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Februari Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dan realisasi fisik 100% dst

h) Belanja Modal Aset Lainnya
Realisasi Keuangan Belanja Modal Aset Lainnya BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Februari Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dan realisasi fisik 0,00% dst

i) Realisasi Belanja Langsung, yang dibedakan dengan klasifikasi capaian realisasi antara lain sebagai berikut :

No	Interval Nilai Realisasi terhadap Target	Kriteria Penilaian Realisasi	Status Realisasi
1	90% ≤ 100%	Tinggi	Hijau
2	66% ≤ 90%	Sedang	Kuning
3	0% ≤ 65%	Rendah	Merah

- ❖ Rendah, Sub Kegiatan dengan realisasi 0% ≤ 65% : 39 Sub Kegiatan
  1) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
  5) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  9) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  11) Fasilitas Kunjungan Tamu
  12) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  13) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  14) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  15) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  16) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  17) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  18) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  19) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
  20) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana provinsi (Per Jenis Bencana)
  21) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
  22) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi
  23) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
  24) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
  25) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
  26) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
  27) Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
  28) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
  29) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
  30) Penanganan Pasca Bencana Provinsi
  31) Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi
  32) Penyusunan , Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
  33) Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota

- ❖ Sedang, Sub Kegiatan dengan realisasi 66% ≤ 90% : 0 Sub Kegiatan

- ❖ Tinggi, Sub Kegiatan dengan realisasi 90% ≤ 100% : 0 Sub Kegiatan

a) Perbandingan antara realisasi dengan target Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang tercantum pada:
   - ➢ Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dan Perubahan Renstra Tahun 2025

Tabel
Indikator Kinerja pada Rencana Strategis RPD BPBD Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025 -2029

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		Target	Target	Target	Target	Target	Target
Meningkatnya Pengelolaan Bencana							
Indeks Resiko Bencana Sumsel	Indeks	130,41	129,78	129,14	128,51	127,88	127,88
Persentase Penanganan Pra Bencana	%	100	100	100	100	100	100
Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100
Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100
Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100	100	100

III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

a) Kendala
- *Tidak ada*

b. Tindak Lanjut yang diperlukan.
- *Tidak ada*

IV. PENUTUP

Demikianlah penjelasan kami mengenai program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan/sub kegiatan Pembangunan APBD Provinsi Sumatera Selatan. Laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk pelaksanaan kegiatan yang sama pada masa yang akan datang, selanjutnya **laporan yang lebih terinci menjadi lampiran** pada dokumen ini.
Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Mei 2026

KEPALA PELAKSANA,
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Muhammad Iqbal Alisyahbana, S.STP., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198505082003121001

LAMPIRAN

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN BULAN JANUARI TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Tahun 2026						Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat / Pendorong
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERANGAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**												
1.05.01	**PROGRAM PENUNJNAG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**Rp 17.946.872.147**	**Rp 4.982.540.804**						
1.05.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Pelaporan**				**Rp 21.000.000**	0,00						
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 10.500.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 10.500.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan**				**Rp 13.796.536.114**	**Rp 3.796.343.534**						
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya kinerja ASN	Orang	57 Orang	57 Orang	Rp 13.763.536.114	Rp 3.788.356.534	27,52	29,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan	1 laporan	1 laporan	Rp 33.000.000	Rp 7.987.000	24,20	26,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat**				**Rp 55.000.000**	**Rp 5.302.900**						
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkat kpasitas SDM	Orang	30 Orang	30 Orang	Rp 55.000.000	Rp 5.302.900	9,64	11,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran Terpenuhi**				**Rp 872.187.961**	**Rp 195.888.448**						
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya kinerja aparatur	Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 80.000.000	Rp 34.900.620	43,63	45,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya kinerja aparatur dalam bekerja	Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 240.670.711	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya kinerja aparatur dalam bekerja	Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 60.000.000	Rp 29.981.100	49,97	51,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran; meningkatnya kenyamanan pegawai dalam bekerja	Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000	Rp 19.715.820	19,72	21,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya pelayanan korban bencana	Jenis Surat Kabar	7 Jenis surat kabar dan majalah	7 Jenis surat kabar dan majalah	Rp 25.517.250	Rp 6.378.000	24,99	26,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Meningkatnya pelayanan kantor	Laporan	1 laporan	1 laporan	Rp 77.500.000	Rp 4.940.000	6,37	8,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya pelayanan kantor	Laporan	1 laporan	1 laporan	Rp 288.500.000	Rp 99.972.908	34,65	36,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**				**Rp 17.250.000**	0,00						
1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Lapangan Evakuasi Korban Bencana	1 Lapangan Evakuasi Korban Bencana	1 Lapangan Evakuasi Korban Bencana	Rp 17.250.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jasa Penunjang Administrasi Kebutuhan Terpenuhi**				**Rp 2.464.898.072**	**Rp 458.606.088**						
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		- Surat - Lembar	- 500 surat - 6.000 lembar materai Rp.10.000	- 500 surat - 6.000 lembar materai Rp.10.000	Rp 70.000.000	Rp 17.327.100	24,75	26,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12 Bulan (4 tagihan)	12 Bulan (4 tagihan)	Rp 630.425.512	Rp 154.253.988	24,47	26,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya kesehatan pegawai	Orang	37 Orang	37 Orang	Rp 1.764.472.560	Rp 287.025.000	16,27	18,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Aset BMD**				**Rp 720.000.000**	**Rp 35.527.900**						
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya kelancaran operasional kantor	Unit	45 Unit kendaraan dinas	45 Unit kendaraan dinas	Rp 570.000.000	Rp 35.527.900	6,23	8,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya operasional dan kinerja aparatur	Unit	60 Unit	60 Unit	Rp 150.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**					**Rp 4.466.753.450**							
1.05.03.1.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi bagi warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota**				**Rp 1.028.500.000**	**Rp 71.680.000**						
1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana Yang Sah dan Legal	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 150.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.01.0004	Sosialisai, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	Orang	500 Orang	500 Orang	Rp 878.500.000	Rp 71.680.000	8,16	10,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada

1.05.03.1.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**- Terlaksananya uji mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana lintas Kabupaten/Kota - Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas - Tersedianya peralatan perlindungan diri bagi keluarga di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota**				**Rp 1.935.420.700**	**Rp 30.302.600**						
1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	Orang	800 Orang	800 Orang	Rp 420.000.000	Rp 30.302.600	7,21	9,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 150.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tersedianya peralatan perlindungan diri bagi keluarga di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Keluarga	3.894 Keluarga	3.894 Keluarga	Rp 780.920.700	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terbentuknya Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan Prosedur tetap (SOP) untuk pengendalian operasi yang sah dan legal dengan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 584.500.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**- Terlaksananya Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana - Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman - Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Provinsi**				**Rp 1.099.332.750**	**Rp 490.871.934**						
1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 35.000.000	Rp 2.501.000	7,15	9,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	7.025 Orang	7.025 Orang	Rp 919.332.750	Rp 447.310.934	48,66	50,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 110.000.000	Rp 41.060.000	37,33	39,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.03.0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 35.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**- Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam - Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) - Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi - Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi - Tersedianya regulasi di daerah untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana) - Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana) - Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota**				**Rp 403.500.000**	**Rp 46.687.500**						

1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	Rp 49.000.000	Rp 12.946.000	26,42	28,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 56.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 158.500.000	Rp 33.741.500	21,29	23,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Rp 105.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kab/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	Rp 35.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
						Rp 22.413.625.597	**Rp 5.131.210.904**	**22,89**	**28,00**				

Palembang, April 2026
KEPALA PELAKSANA,
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Muhammad Iqbal Hisyambana, S.STP., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198505092003121001

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2026



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum Perangkat Daerah:

1. Tujuan;

Dalam pencapaian Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 24 tahun 2007, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019, yang mempunyai tugas:

1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan;
3. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota

Selain tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjalankan fungsi :

1) Koordinasi

Koordinasi penanggulangan bencana dilaksanakan dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut satu diantaranya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. dalam kondisi tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjalankan fungsi komando.

2) **Komando**

Komando dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi yang terakhir adalah peran pelaksana.

3) **Pelaksana**

Pelaksana, terkait dengan pelaksanaan penanggulangan bencana pada semua tahapan bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memerhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, kebijakan pembangunan nasional, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sasaran;

1) Menurunkan Risiko Bencana Provinsi Sumatera Selatan

3. Belanja, Program APBD:

a) Belanja Perangkat Daerah;

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
5	**BELANJA DAERAH**	**22.413.625.597,00**	**6.675.514.114,00**	**29,78**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**21.559.784.186,00**	**6.675.514.114,00**	**30,59**
5.1.01	**Belanja Pegawai**	13.763.536.114,00	4.618.882.818,00	33,55
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	7.796.248.072,00	1.977.377.296,00	25,36
5.2	**BELANJA MODAL**	**853.841.411,00**	**79.254.000,00**	**9,28**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	731.591.411,00	0	0
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	17.250.000,00	0	0
5.2.06	**Belanja Modal Aset Lainnya**	105.000.000,00	0	0
	TOTAL	**22.413.625.597,00**	**6.675.514.114,00**	**29,78**

b) **Program dan Anggaran APBD;**

No		Program/ Kegiatan	Penyediaan Dana
1		*2*	*3*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**21.000.000,00**
	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	10.500.000,00
	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.500.000,00
02		**Adminisrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.796.536.114,00**
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.763.536.114,00
	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	33.000.000,00
05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**55.000.000,00**
	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.000.000,00
06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**872.187.961,00**
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80.000.000,00
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	240.670.711,00
	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000,00
	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.000.000,00
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.517.250,00
	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	77.500.000,00
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288.500.000,00
07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**17.250.000,00**
	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.250.000,00
08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.464.898.072,00**

	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	70.000.000,00
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	630.425.512,00
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.764.472.560,00
09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**720.000.000,00**
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	570.000.000,00
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000,00
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**1.028.500.000,00**
	03	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	150.000.000,00
	04	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	878.500.000,00
02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**1.935.420.700,00**
	23	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	420.000.000,00
	24	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	150.000.000,00
	28	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	780.920.700,00
	29	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	584.500.000,00
03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**1.099.332.750,00**
	25	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	35.000.000,00
	28	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	919.332.750,00
	30	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	110.000.000,00
	31	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	35.000.000,00
04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**403.500.000,00**
	06	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	49.000.000,00
	07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	56.000.000,00
	09	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	158.500.000,00
	22	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	105.000.000,00
	23	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	35.000.000,00
J U M L A H			**22.413.625.597,00**

4. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Renstra) dan Indikator Kinerja Daerah (RPJMD);

Pada RPJMD/RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 selaras dengan Indikator Tujuan/Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 :

1. Indeks Risiko Bencana Provinsi Sumsel
2. Persentase Penanganan Pra Bencana
3. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana
4. Persentase Penanganan Pasca Bencana
5. Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan sampai dengan dinyatakan Sah/Legal

5. Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan kewilayahan (lokasi).

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebar di Provinsi Sumatera Selatan dan 17 Kabupaten/Kota, antara lain sebagai berikut:

- ❖ Penyusunan Kajian Risiko Bencana
- ❖ Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)
- ❖ Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- ❖ Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi
- ❖ Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
- ❖ Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- ❖ Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
- ❖ Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- ❖ Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
- ❖ Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- ❖ Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
- ❖ Penanganan Pasca Bencana Provinsi
- ❖ Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi
- ❖ Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
- ❖ Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang hanya tersebar di Provinsi Sumatera Selatan, antara lain sebagai berikut:

- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- ❖ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- ❖ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- ❖ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- ❖ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

- ❖ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ❖ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- ❖ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ❖ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- ❖ Fasilitas Kunjungan Tamu
- ❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- ❖ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gdung Kantor atau Bangunan Lainnya
- ❖ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- ❖ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- ❖ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- ❖ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD dan APBN Tahun Anggaran 2026 sampai dengan triwulan laporan, yang minimal meliputi :

a. Perbandingan antara realisasi (keuangan, fisik dan kinerja) dengan target kinerja program/kegiatan yang tercantum pada DPA Perangkat Daerah dan DIPA APBN :

1. Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBD Provinsi Sumatera Selatan:

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d. bulan Ini	Realisasi s.d. bulan ini	Target s.d Triwulan ini	Realisasi s.d. bulan ini
-1	-2	-3	-4	(5 = 3/2 *100%)	-6	-7
BELANJA DAERAH	**22.413.625.597,00**	**6.675.514.114,00**	**25,00%**	**29,78%**	**25,00%**	**33,00%**
BELANJA OPERASI	**21.559.784.186,00**	**6.596.260.114,00**	**25,00%**	**30,59%**	**25,00%**	**33,00%**
Belanja Pegawai	13.763.536.114,00	4.618.882.818,00	25,00%	33,55%	25,00%	35,00%
Belanja Barang dan Jasa	7.796.248.072,00	1.977.377.296,00	25,00%	25,36%	25,00%	30,00%
BELANJA MODAL	**853.841.411,00**	**79.254.000,00**	**25,00%**	**9,28%**	**25,00%**	**12,00%**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	731.591.411,00	0	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.250.000,00	0	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%
Belanja Modal Aset Lainnya	105.000.000,00	0	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%

a) Realisasi Belanja Daerah
Realisasi Keuangan Total Belanja BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Maret Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 6.675.514.114,00 atau 29,78% dan realisasi fisik 33,00% dst

b) Realisasi Belanja Operasi
Realisasi Keuangan Belanja Operasi BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Februari Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 6.596.260.114,00 atau 30,59 % dan realisasi fisik 33,00% dst

c) Realisasi Belanja Pegawai
Realisasi Keuangan Belanja Pegawai BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Februari Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 4.618.882.818,00 atau 33,55% dan realisasi fisik 35,00% dst

d) Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Realisasi Keuangan Belanja Barang dan Jasa BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Februari Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 1.977.377.296,00 atau 25,36% dan realisasi fisik 30,00% dst

e) Realisasi Belanja Modal
Realisasi Keuangan Belanja Modal BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Februari Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 79.254.000,00 atau 9,28% dan realisasi fisik 12,00% dst

f) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi Keuangan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Februari Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dan realisasi fisik 0,00% dst

g) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Realisasi Keuangan Belanja Modal Gedung dan Bangunan BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Februari Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dan realisasi fisik 100% dst

h) Belanja Modal Aset Lainnya
Realisasi Keuangan Belanja Modal Aset Lainnya BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Februari Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dan realisasi fisik 0,00% dst

i) Realisasi Belanja Langsung, yang dibedakan dengan klasifikasi capaian realisasi antara lain sebagai berikut :

No	Interval Nilai Realisasi terhadap Target	Kriteria Penilaian Realisasi	Status Realisasi
1	90% ≤ 100%	Tinggi	Hijau
2	66% ≤ 90%	Sedang	Kuning
3	0% ≤ 65%	Rendah	Merah

- ❖ Rendah, Sub Kegiatan dengan realisasi 0% ≤ 65% : 39 Sub Kegiatan
  1) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
  5) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  9) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  11) Fasilitas Kunjungan Tamu
  12) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  13) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  14) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  15) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  16) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  17) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  18) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  19) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
  20) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana provinsi (Per Jenis Bencana)
  21) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
  22) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi
  23) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
  24) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
  25) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
  26) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
  27) Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
  28) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
  29) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
  30) Penanganan Pasca Bencana Provinsi
  31) Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi
  32) Penyusunan , Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
  33) Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota

- ❖ Sedang, Sub Kegiatan dengan realisasi 66% ≤ 90% : 0 Sub Kegiatan

- ❖ Tinggi, Sub Kegiatan dengan realisasi 90% ≤ 100% : 0 Sub Kegiatan

a) Perbandingan antara realisasi dengan target Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang tercantum pada:

- Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dan Perubahan Renstra Tahun 2025

Tabel
Indikator Kinerja pada Rencana Strategis RPD BPBD Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025 -2029

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		Target	Target	Target	Target	Target	Target
Meningkatnya Pengelolaan Bencana							
Indeks Resiko Bencana Sumsel	Indeks	130,41	129,78	129,14	128,51	127,88	127,88
Persentase Penanganan Pra Bencana	%	100	100	100	100	100	100
Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100
Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100
Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100	100	100

III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

a) Kendala
- *Tidak ada*

b. Tindak Lanjut yang diperlukan.
- *Tidak ada*

IV. PENUTUP

Demikianlah penjelasan kami mengenai program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan/sub kegiatan Pembangunan APBD Provinsi Sumatera Selatan. Laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk pelaksanaan kegiatan yang sama pada masa yang akan datang, selanjutnya **laporan yang lebih terinci menjadi lampiran** pada dokumen ini.
Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Juni 2026

KEPALA PELAKSANA,
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Muhammad Iqbal Alisyahbana,S.STP., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198505082003121001

LAMPIRAN

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN BULAN JANUARI TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Tahun 2026						Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat / Pendorong
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERANGAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**												
1.05.01	**PROGRAM PENUNJNAG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**Rp 17.946.872.147**	**Rp 6.211.737.514**						
1.05.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Pelaporan**				**Rp 21.000.000**	0,00						
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 10.500.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 10.500.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan**				**Rp 13.796.536.114**	**Rp 4.626.869.818**						
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya kinerja ASN	Orang	57 Orang	57 Orang	Rp 13.763.536.114	Rp 4.618.882.818	33,56	35,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan	1 laporan	1 laporan	Rp 33.000.000	Rp 7.987.000	24,20	26,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat**				**Rp 55.000.000**	**Rp 8.602.900**						
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkat kpasitas SDM	Orang	30 Orang	30 Orang	Rp 55.000.000	Rp 8.602.900	15,64	17,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran Terpenuhi**				**Rp 872.187.961**	**Rp 342.369.178**						
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya kinerja aparatur	Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 80.000.000	Rp 34.900.620	43,63	45,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya kinerja aparatur dalam bekerja	Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 240.670.711	Rp 119.253.960	49,55	51,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya kinerja aparatur dalam bekerja	Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 60.000.000	Rp 29.981.100	49,97	51,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran; meningkatnya kenyamanan pegawai dalam bekerja	Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000	Rp 19.715.820	19,72	21,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya pelayanan korban bencana	Jenis Surat Kabar	7 Jenis surat kabar dan majalah	7 Jenis surat kabar dan majalah	Rp 25.517.250	Rp 8.504.000	33,33	35,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Meningkatnya pelayanan kantor	Laporan	1 laporan	1 laporan	Rp 77.500.000	Rp 18.840.000	24,31	26,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya pelayanan kantor	Laporan	1 laporan	1 laporan	Rp 288.500.000	Rp 111.173.678	38,54	40,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**				**Rp 17.250.000**	0,00						
1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Lapangan Evakuasi Korban Bencana	1 Lapangan Evakuasi Korban Bencana	1 Lapangan Evakuasi Korban Bencana	Rp 17.250.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jasa Penunjang Administrasi Kebutuhan Terpenuhi**				**Rp 2.464.898.072**	**Rp 661.015.784**						
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		- Surat - Lembar	- 500 surat - 6.000 lembar materai Rp.10.000	- 500 surat - 6.000 lembar materai Rp.10.000	Rp 70.000.000	Rp 17.327.100	24,75	26,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12 Bulan (4 tagihan)	12 Bulan (4 tagihan)	Rp 630.425.512	Rp 187.913.684	29,81	31,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya kesehatan pegawai	Orang	37 Orang	37 Orang	Rp 1.764.472.560	Rp 455.775.000	25,83	27,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Aset BMD**				**Rp 720.000.000**	**Rp 82.007.900**						
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya kelancaran operasional kantor	Unit	45 Unit kendaraan dinas	45 Unit kendaraan dinas	Rp 570.000.000	Rp 82.007.900	14,39	8,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya operasional dan kinerja aparatur	Unit	60 Unit	60 Unit	Rp 150.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**					**Rp 4.466.753.450**							
1.05.03.1.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**Terlaksanannya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi bagi warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota**				**Rp 1.028.500.000**	**Rp 116.180.000**						
1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana Yang Sah dan Legal	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 150.000.000	Rp 4.500.000	3,00	6,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.01.0004	Sosialisai, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	Orang	500 Orang	500 Orang	Rp 878.500.000	Rp 111.680.000	12,71	14,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada

1.05.03.1.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**- Terlaksananya uji mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana lintas Kabupaten/Kota - Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas - Tersedianya peralatan perlindungan diri bagi keluarga di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota**				**Rp 1.935.420.700**	**Rp 279.359.100**						
1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	Orang	800 Orang	800 Orang	Rp 420.000.000	Rp 279.359.100	66,51	68,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 150.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tersedianya peralatan perlindungan diri bagi keluarga di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Keluarga	3.894 Keluarga	3.894 Keluarga	Rp 780.920.700	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terbentuknya Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan Prosedur tetap (SOP) untuk pengendalian operasi yang sah dan legal dengan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 584.500.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**- Terlaksananya Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana - Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman - Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Provinsi**				**Rp 1.099.332.750**	**Rp 490.871.934**						
1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 35.000.000	Rp 2.501.000	7,15	9,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	7.025 Orang	7.025 Orang	Rp 919.332.750	Rp 447.310.934	48,66	50,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 110.000.000	Rp 41.060.000	37,33	39,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.03.0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 35.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**- Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam - Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) - Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi - Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi - Tersedianya regulasi di daerah untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana) - Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana) - Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota**				**Rp 403.500.000**	**Rp 68.237.500**						

1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	Rp 49.000.000	Rp 34.496.000	70,40	72,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 56.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 158.500.000	Rp 33.741.500	21,29	23,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Rp 105.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kab/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	Rp 35.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
						Rp 22.413.625.597	**Rp 6.675.514.114**	**29,78**	**33,00**				

Palembang, Mei 2026
KEPALA PELAKSANA,
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Muhammad Iqbal Alieyahbana, S.STP.,MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198505082003121001

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2026



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum Perangkat Daerah:

1. Tujuan;

Dalam pencapaian Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 24 tahun 2007, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019, yang mempunyai tugas:

1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan;
3. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota

Selain tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjalankan fungsi :

1) Koordinasi

Koordinasi penanggulangan bencana dilaksanakan dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut satu diantaranya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. dalam kondisi tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjalankan fungsi komando.

2) Komando

Komando dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi yang terakhir adalah peran pelaksana.

3) Pelaksana

Pelaksana, terkait dengan pelaksanaan penanggulangan bencana pada semua tahapan bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memerhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, kebijakan pembangunan nasional, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sasaran;

1) Menurunkan Risiko Bencana Provinsi Sumatera Selatan

3. Belanja, Program APBD:

a) Belanja Perangkat Daerah;

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
5	**BELANJA DAERAH**	**22.413.625.597,00**	**9.985.600.224,00**	**44,55**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**21.559.784.186,00**	**9.905.346.224,00**	**45,94**
5.1.01	**Belanja Pegawai**	13.763.536.114,00	7.037.803.437,00	51,13
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	7.796.248.072,00	2.868.542.787,00	36,79
5.2	**BELANJA MODAL**	**853.841.411,00**	**79.254.000,00**	**9,28**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	731.591.411,00	0	0
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	17.250.000,00	0	0
5.2.06	**Belanja Modal Aset Lainnya**	105.000.000,00	0	0
	TOTAL	**22.413.625.597,00**	**9.985.600.224,00**	**44,55**

b) **Program dan Anggaran APBD;**

No		Program/ Kegiatan	Penyediaan Dana
1		*2*	*3*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**21.000.000,00**
	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	10.500.000,00
	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.500.000,00
02		**Adminisrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.796.536.114,00**
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.763.536.114,00
	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	33.000.000,00
05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**55.000.000,00**
	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.000.000,00
06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**872.187.961,00**
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80.000.000,00
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	240.670.711,00
	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000,00
	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.000.000,00
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.517.250,00
	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	77.500.000,00
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288.500.000,00
07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**17.250.000,00**
	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.250.000,00
08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.464.898.072,00**

	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	70.000.000,00
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	630.425.512,00
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.764.472.560,00
09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**720.000.000,00**
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	570.000.000,00
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000,00
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**1.028.500.000,00**
	03	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	150.000.000,00
	04	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	878.500.000,00
02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**1.935.420.700,00**
	23	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	420.000.000,00
	24	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	150.000.000,00
	28	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	780.920.700,00
	29	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	584.500.000,00
03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**1.099.332.750,00**
	25	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	35.000.000,00
	28	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	919.332.750,00
	30	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	110.000.000,00
	31	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	35.000.000,00
04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**403.500.000,00**
	06	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	49.000.000,00
	07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	56.000.000,00
	09	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	158.500.000,00
	22	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	105.000.000,00
	23	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	35.000.000,00
J U M L A H			**22.413.625.597,00**

4. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Renstra) dan Indikator Kinerja Daerah (RPJMD);

Pada RPJMD/RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 selaras dengan Indikator Tujuan/Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 :

1. Indeks Risiko Bencana Provinsi Sumsel
2. Persentase Penanganan Pra Bencana
3. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana
4. Persentase Penanganan Pasca Bencana
5. Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan sampai dengan dinyatakan Sah/Legal

5. Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan kewilayahan (lokasi).

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebar di Provinsi Sumatera Selatan dan 17 Kabupaten/Kota, antara lain sebagai berikut:

- ❖ Penyusunan Kajian Risiko Bencana
- ❖ Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)
- ❖ Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- ❖ Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi
- ❖ Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
- ❖ Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- ❖ Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
- ❖ Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- ❖ Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
- ❖ Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- ❖ Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
- ❖ Penanganan Pasca Bencana Provinsi
- ❖ Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi
- ❖ Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
- ❖ Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang hanya tersebar di Provinsi Sumatera Selatan, antara lain sebagai berikut:

- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- ❖ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- ❖ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- ❖ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- ❖ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

- ❖ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ❖ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- ❖ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ❖ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- ❖ Fasilitas Kunjungan Tamu
- ❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- ❖ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gdung Kantor atau Bangunan Lainnya
- ❖ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- ❖ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- ❖ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- ❖ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD dan APBN Tahun Anggaran 2026 sampai dengan triwulan laporan, yang minimal meliputi :

a. Perbandingan antara realisasi (keuangan, fisik dan kinerja) dengan target kinerja program/kegiatan yang tercantum pada DPA Perangkat Daerah dan DIPA APBN :

1. Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBD Provinsi Sumatera Selatan:

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d. bulan Ini	Realisasi s.d. bulan ini	Target s.d Triwulan ini	Realisasi s.d. bulan ini
-1	-2	-3	-4	(5 = 3/2 *100%)	-6	-7
BELANJA DAERAH	**22.413.625.597,00**	**9.985.600.224,00**	**25,00%**	**44,55**	**25,00%**	**46,00%**
BELANJA OPERASI	**21.559.784.186,00**	**9.906.346.224,00**	**25,00%**	**45,94**	**25,00%**	**47,00%**
Belanja Pegawai	13.763.536.114,00	7.037.803.437,00	25,00%	61,13	25,00%	64,00%
Belanja Barang dan Jasa	7.796.248.072,00	2.868.542.787,00	25,00%	36,79	25,00%	39,00%
BELANJA MODAL	**853.841.411,00**	**79.254.000,00**	**25,00%**	**9,28**	**25,00%**	**12,00%**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	731.591.411,00	0	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.250.000,00	0	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%
Belanja Modal Aset Lainnya	105.000.000,00	0	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%

a) Realisasi Belanja Daerah
Realisasi Keuangan Total Belanja BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Juli Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 9.985.600.224,00 atau 44.55% dan realisasi fisik 46,00% dst

b) Realisasi Belanja Operasi
Realisasi Keuangan Belanja Operasi BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Juli Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 9.906.346.224,00 atau 45.94 % dan realisasi fisik 47,00 % dst

c) Realisasi Belanja Pegawai
Realisasi Keuangan Belanja Pegawai BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Juli Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 7.037.803.437,00 atau 61,13% dan realisasi fisik 64,00% dst

d) Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Realisasi Keuangan Belanja Barang dan Jasa BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Juli Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 2.868.542.787,00 atau 36,79 % dan realisasi fisik 39,00% dst

e) Realisasi Belanja Modal
Realisasi Keuangan Belanja Modal BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Juli Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 79.254.000,00 atau 9,28% dan realisasi fisik 12,00% dst

f) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi Keuangan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Juli Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dan realisasi fisik 0,00% dst

g) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Realisasi Keuangan Belanja Modal Gedung dan Bangunan BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Juli Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dan realisasi fisik 100% dst

h) Belanja Modal Aset Lainnya
Realisasi Keuangan Belanja Modal Aset Lainnya BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Juli Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dan realisasi fisik 0,00% dst

i) Realisasi Belanja Langsung, yang dibedakan dengan klasifikasi capaian realisasi antara lain sebagai berikut :

No	Interval Nilai Realisasi terhadap Target	Kriteria Penilaian Realisasi	Status Realisasi
1	90% ≤ 100%	Tinggi	Hijau
2	66% ≤ 90%	Sedang	Kuning
3	0% ≤ 65%	Rendah	Merah

- ❖ Rendah, Sub Kegiatan dengan realisasi 0% ≤ 65% : 39 Sub Kegiatan
  1) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
  5) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  9) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  11) Fasilitas Kunjungan Tamu
  12) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  13) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  14) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  15) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  16) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  17) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  18) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  19) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
  20) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana provinsi (Per Jenis Bencana)
  21) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
  22) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi
  23) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
  24) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
  25) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
  26) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
  27) Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
  28) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
  29) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
  30) Penanganan Pasca Bencana Provinsi
  31) Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi
  32) Penyusunan , Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
  33) Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota

- ❖ Sedang, Sub Kegiatan dengan realisasi 66% ≤ 90% : 0 Sub Kegiatan

- ❖ Tinggi, Sub Kegiatan dengan realisasi 90% ≤ 100% : 0 Sub Kegiatan

a) Perbandingan antara realisasi dengan target Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang tercantum pada:

➢ Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dan Perubahan Renstra Tahun 2025

Tabel
Indikator Kinerja pada Rencana Strategis RPD BPBD Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025 -2029

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		Target	Target	Target	Target	Target	Target
Meningkatnya Pengelolaan Bencana							
Indeks Resiko Bencana Sumsel	Indeks	130,41	129,78	129,14	128,51	127,88	127,88
Persentase Penanganan Pra Bencana	%	100	100	100	100	100	100
Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100
Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100
Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100	100	100

III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

a) Kendala
- *Tidak ada*

b. Tindak Lanjut yang diperlukan.
- *Tidak ada*

IV. PENUTUP

Demikianlah penjelasan kami mengenai program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan/sub kegiatan Pembangunan APBD Provinsi Sumatera Selatan. Laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk pelaksanaan kegiatan yang sama pada masa yang akan datang, selanjutnya **laporan yang lebih terinci menjadi lampiran** pada dokumen ini.
Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Agustus 2026

KEPALA PELAKSANA,
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Muhammad Iqbal Alisyahbana,S.STP., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198505082003121001

LAMPIRAN

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN BULAN JULI TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Tahun 2026						Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat / Pendorong
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERANGAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**												
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**Rp 17.946.872.147**	**Rp 9.191.656.921**						
1.05.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Pelaporan**				**Rp 21.000.000**	0,00						
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 10.500.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 10.500.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan**				**Rp 13.796.536.114**	**Rp 7.045.790.437**						
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya kinerja ASN	Orang	57 Orang	57 Orang	Rp 13.763.536.114	Rp 7.037.803.437	51,13	53,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan	1 laporan	1 laporan	Rp 33.000.000	Rp 7.987.000	24,20	26,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat**				**Rp 55.000.000**	**Rp 8.602.900**						
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkat kpasitas SDM	Orang	30 Orang	30 Orang	Rp 55.000.000	Rp 8.602.900	15,64	17,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran Terpenuhi**				**Rp 872.187.961**	**Rp 399.911.349**						
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya kinerja aparatur	Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 80.000.000	Rp 34.900.620	43,63	45,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya kinerja aparatur dalam bekerja	Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 240.670.711	Rp 119.253.960	49,55	51,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya kinerja aparatur dalam bekerja	Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 60.000.000	Rp 29.981.100	49,97	51,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran; meningkatnya kenyamanan pegawai dalam bekerja	Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000	Rp 19.715.820	19,72	21,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya pelayanan korban bencana	Jenis Surat Kabar	7 Jenis surat kabar dan majalah	7 Jenis surat kabar dan majalah	Rp 25.517.250	Rp 8.504.000	33,33	35,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Meningkatnya pelayanan kantor	Laporan	1 laporan	1 laporan	Rp 77.500.000	Rp 26.650.000	34,39	36,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya pelayanan kantor	Laporan	1 laporan	1 laporan	Rp 288.500.000	Rp 160.905.849	55,77	57,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**				**Rp 17.250.000**	0,00						
1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Lapangan Evakuasi Korban Bencana	1 Lapangan Evakuasi Korban Bencana	1 Lapangan Evakuasi Korban Bencana	Rp 17.250.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jasa Penunjang Administrasi Kebutuhan Terpenuhi**				**Rp 2.464.898.072**	**Rp 1.093.475.709**						
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		- Surat - Lembar	- 500 surat - 6.000 lembar materai Rp.10.000	- 500 surat - 6.000 lembar materai Rp.10.000	Rp 70.000.000	Rp 17.327.100	24,75	26,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12 Bulan (4 tagihan)	12 Bulan (4 tagihan)	Rp 630.425.512	Rp 280.601.109	44,51	46,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya kesehatan pegawai	Orang	37 Orang	37 Orang	Rp 1.764.472.560	Rp 795.547.500	45,09	47,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Aset BMD**				**Rp 720.000.000**	**Rp 136.469.592**						
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya kelancaran operasional kantor	Unit	45 Unit kendaraan dinas	45 Unit kendaraan dinas	Rp 570.000.000	Rp 91.909.775	16,12	18,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya operasional dan kinerja aparatur	Unit	60 Unit	60 Unit	Rp 150.000.000	Rp 44.559.817	29,71	31,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**					**Rp 4.466.753.450**							
1.05.03.1.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi bagi warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota**				**Rp 1.028.500.000**	**Rp 309.280.000**						
1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana Yang Sah dan Legal	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 150.000.000	Rp 35.100.000	23,40	25,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.01.0004	Sosialisai, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	Orang	500 Orang	500 Orang	Rp 878.500.000	Rp 274.180.000	31,21	21,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada

1.05.03.1.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**- Terlaksananya uji mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana lintas Kabupaten/Kota - Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas - Tersedianya peralatan perlindungan diri bagi keluarga di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota**				**Rp 1.935.420.700**	**Rp 370.108.967**						
1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	Orang	800 Orang	800 Orang	Rp 420.000.000	Rp 279.359.100	66,51	68,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 150.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tersedianya peralatan perlindungan diri bagi keluarga di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Keluarga	3.894 Keluarga	3.894 Keluarga	Rp 780.920.700	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terbentuknya Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan Prosedur tetap (SOP) untuk pengendalian operasi yang sah dan legal dengan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 584.500.000	Rp 90.749.867	15,53	17,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**- Terlaksananya Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana - Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman - Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Provinsi**				**Rp 1.099.332.750**	**Rp 507.406.934**						
1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 35.000.000	Rp 4.151.000	11,86	13,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	7.025 Orang	7.025 Orang	Rp 919.332.750	Rp 452.305.934	49,20	51,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 110.000.000	Rp 50.950.000	46,32	48,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.03.0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 35.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**- Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam - Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) - Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi - Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi - Tersedianya regulasi di daerah untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana) - Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana) - Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota**				**Rp 403.500.000**	**Rp 109.154.336**						

1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	Rp 49.000.000	Rp 34.496.000	70,40	72,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 56.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 158.500.000	Rp 61.059.336	38,52	40,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Rp 105.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kab/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	Rp 35.000.000	Rp 13.599.000	38,85	40,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
						Rp 22.413.625.597	**Rp 9.980.200.224**	**44,53**	**48,00**				

Palembang, Juli 2026
KEPALA PELAKSANA,
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Muhammad Iqbal Alisyahbana, S.STP., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198505082003121001

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2026

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2026 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum Perangkat Daerah:

1. Tujuan;

Dalam pencapaian Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 24 tahun 2007, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019, yang mempunyai tugas:

1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan;
3. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota

Selain tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjalankan fungsi :

1) Koordinasi

Koordinasi penanggulangan bencana dilaksanakan dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut satu diantaranya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. dalam kondisi tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjalankan fungsi komando.

2) **Komando**

Komando dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi yang terakhir adalah peran pelaksana.

3) **Pelaksana**

Pelaksana, terkait dengan pelaksanaan penanggulangan bencana pada semua tahapan bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memerhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, kebijakan pembangunan nasional, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sasaran;

1) Menurunkan Risiko Bencana Provinsi Sumatera Selatan

3. Belanja, Program APBD:

a) Belanja Perangkat Daerah;

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
5	**BELANJA DAERAH**	**22.413.625.597,00**	**11.793.25.232,00**	**52,61**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**21.559.784.186,00**	**11.693.294.732,00**	**54,23**
5.1.01	**Belanja Pegawai**	13.763.536.114,00	7.818.099.416,00	56,80
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	7.796.248.072,00	3.875.195.316,00	49,70
5.2	**BELANJA MODAL**	**853.841.411,00**	**79.254.000,00**	**9,28**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	731.591.411,00	0	0
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	17.250.000,00	0	0
5.2.06	**Belanja Modal Aset Lainnya**	105.000.000,00	0	0
	TOTAL	**22.413.625.597,00**	**9.985.600.224,00**	**52,61**

b) **Program dan Anggaran APBD;**

No		Program/ Kegiatan	Penyediaan Dana
1		*2*	*3*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**21.000.000,00**
	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	10.500.000,00
	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.500.000,00
02		**Adminisrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.796.536.114,00**
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.763.536.114,00
	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	33.000.000,00
05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**55.000.000,00**
	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.000.000,00
06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**872.187.961,00**
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80.000.000,00
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	240.670.711,00
	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000,00
	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.000.000,00
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.517.250,00
	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	77.500.000,00
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288.500.000,00
07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**17.250.000,00**
	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.250.000,00
08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.464.898.072,00**

	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	70.000.000,00
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	630.425.512,00
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.764.472.560,00
09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**720.000.000,00**
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	570.000.000,00
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000,00
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**1.028.500.000,00**
	03	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	150.000.000,00
	04	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	878.500.000,00
02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**1.935.420.700,00**
	23	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	420.000.000,00
	24	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	150.000.000,00
	28	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	780.920.700,00
	29	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	584.500.000,00
03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**1.099.332.750,00**
	25	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	35.000.000,00
	28	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	919.332.750,00
	30	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	110.000.000,00
	31	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	35.000.000,00
04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**403.500.000,00**
	06	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	49.000.000,00
	07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	56.000.000,00
	09	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	158.500.000,00
	22	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	105.000.000,00
	23	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	35.000.000,00
J U M L A H			**22.413.625.597,00**

4. **Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Renstra) dan Indikator Kinerja Daerah (RPJMD);**

Pada RPJMD/RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 selaras dengan Indikator Tujuan/Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 :

1. Indeks Risiko Bencana Provinsi Sumsel
2. Persentase Penanganan Pra Bencana
3. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana
4. Persentase Penanganan Pasca Bencana
5. Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan sampai dengan dinyatakan Sah/Legal

5. **Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan kewilayahan (lokasi).**

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebar di Provinsi Sumatera Selatan dan 17 Kabupaten/Kota, antara lain sebagai berikut:

- ❖ Penyusunan Kajian Risiko Bencana
- ❖ Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)
- ❖ Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- ❖ Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi
- ❖ Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
- ❖ Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- ❖ Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
- ❖ Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- ❖ Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
- ❖ Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- ❖ Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
- ❖ Penanganan Pasca Bencana Provinsi
- ❖ Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi
- ❖ Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
- ❖ Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang hanya tersebar di Provinsi Sumatera Selatan, antara lain sebagai berikut:

- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- ❖ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- ❖ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- ❖ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- ❖ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

- ❖ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ❖ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- ❖ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ❖ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- ❖ Fasilitas Kunjungan Tamu
- ❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- ❖ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gdung Kantor atau Bangunan Lainnya
- ❖ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- ❖ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- ❖ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- ❖ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD dan APBN Tahun Anggaran 2026 sampai dengan triwulan laporan, yang minimal meliputi :

a. Perbandingan antara realisasi (keuangan, fisik dan kinerja) dengan target kinerja program/kegiatan yang tercantum pada DPA Perangkat Daerah dan DIPA APBN :

1. Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBD Provinsi Sumatera Selatan:

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d. bulan Ini	Realisasi s.d. bulan ini	Target s.d Triwulan ini	Realisasi s.d. bulan ini
-1	-2	-3	-4	(5 = 3/2 *100%)	-6	-7
BELANJA DAERAH	**22.413.625.597,00**	**11.793.250.232,00**	**25,00%**	**52,61 %**	**25,00%**	**55,00%**
BELANJA OPERASI	**21.559.784.186,00**	**11.693.294.732,00**	**25,00%**	**54,23 %**	**25,00%**	**57,00%**
Belanja Pegawai	13.763.536.114,00	7.818.099.416,00	25,00%	56,80 %	25,00%	58,00%
Belanja Barang dan Jasa	7.796.248.072,00	3.875.195.316,00	25,00%	49,70 %	25,00%	52,00%
BELANJA MODAL	**853.841.411,00**	**99.955.500,00**	**25,00%**	**11,70 %**	**25,00%**	**13,00%**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	731.591.411,00	99.955.500,00	25,00%	13,66 %	25,00%	16,00%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.250.000,00	0	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%
Belanja Modal Aset Lainnya	105.000.000,00	0	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%

a) Realisasi Belanja Daerah

Realisasi Keuangan Total Belanja BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Agustus Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 11.793.250.232,00 atau 52,61% dan realisasi fisik 55,00% dst

b) Realisasi Belanja Operasi

Realisasi Keuangan Belanja Operasi BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Agustus Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 11.693.294.732,00 atau 54.23 % dan realisasi fisik 57,00 % dst

c) Realisasi Belanja Pegawai

Realisasi Keuangan Belanja Pegawai BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Agustus Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 7.818.099.416,00 atau 56,80 % dan realisasi fisik 58,00% dst

d) Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Keuangan Belanja Barang dan Jasa BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Agustus Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 3.875.195.316,00 atau 49,70 % dan realisasi fisik 52,00% dst

e) Realisasi Belanja Modal

Realisasi Keuangan Belanja Modal BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Agustus Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 99.955.500,00 atau 11,70% dan realisasi fisik 13,00% dst

f) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Keuangan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Agustus Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 99.955.500,00 atau 13,66 % dan realisasi fisik 16,00% dst

g) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Keuangan Belanja Modal Gedung dan Bangunan BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Agustus Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dan realisasi fisik 100% dst

h) Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi Keuangan Belanja Modal Aset Lainnya BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Agustus Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dan realisasi fisik 0,00% dst

i) Realisasi Belanja Langsung, yang dibedakan dengan klasifikasi capaian realisasi antara lain sebagai berikut :

No	Interval Nilai Realisasi terhadap Target	Kriteria Penilaian Realisasi	Status Realisasi
1	90% ≤ 100%	Tinggi	Hijau
2	66% ≤ 90%	Sedang	Kuning
3	0% ≤ 65%	Rendah	Merah

- ❖ Rendah, Sub Kegiatan dengan realisasi 0% ≤ 65% : 39 Sub Kegiatan
  1) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
  5) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  9) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  11) Fasilitas Kunjungan Tamu
  12) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  13) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  14) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  15) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  16) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  17) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  18) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  19) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
  20) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana provinsi (Per Jenis Bencana)
  21) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
  22) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi
  23) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
  24) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
  25) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
  26) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
  27) Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
  28) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
  29) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
  30) Penanganan Pasca Bencana Provinsi
  31) Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi
  32) Penyusunan , Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
  33) Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota

- ❖ Sedang, Sub Kegiatan dengan realisasi 66% ≤ 90% : 0 Sub Kegiatan

- ❖ Tinggi, Sub Kegiatan dengan realisasi 90% ≤ 100% : 0 Sub Kegiatan

a) Perbandingan antara realisasi dengan target Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang tercantum pada:
   - ➢ Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dan Perubahan Renstra Tahun 2025

Tabel
Indikator Kinerja pada Rencana Strategis RPD BPBD Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025 -2029

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		Target	Target	Target	Target	Target	Target
Meningkatnya Pengelolaan Bencana							
Indeks Resiko Bencana Sumsel	Indeks	130,41	129,78	129,14	128,51	127,88	127,88
Persentase Penanganan Pra Bencana	%	100	100	100	100	100	100
Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100
Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100
Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100	100	100

III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

a) Kendala
- *Tidak ada*

b. Tindak Lanjut yang diperlukan.
- *Tidak ada*

IV. PENUTUP

Demikianlah penjelasan kami mengenai program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan/sub kegiatan Pembangunan APBD Provinsi Sumatera Selatan. Laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk pelaksanaan kegiatan yang sama pada masa yang akan datang, selanjutnya **laporan yang lebih terinci menjadi lampiran** pada dokumen ini.
Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, September 2026

KEPALA PELAKSANA,
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Muhammad Iqbal Alisyahbana,S.STP., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198505082003121001

LAMPIRAN

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN BULAN AGUSTUS TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Tahun 2026						Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat / Pendorong
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERANGAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
1.05.01	PROGRAM PENUNJNAG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					Rp 17.946.872.147	Rp 10.898.655.428						
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan				Rp 21.000.000	Rp 3.445.000						
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 10.500.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 10.500.000	Rp 3.445.000	32,81	34,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan				Rp 13.796.536.114	Rp 8.318.132.509						
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya kinerja ASN	Orang	57 Orang	57 Orang	Rp 13.763.536.114	Rp 8.310.145.509	60,38	62,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan	1 laporan	1 laporan	Rp 33.000.000	Rp 7.987.000	24,20	26,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat				Rp 55.000.000	Rp 8.602.900						
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkat kpasitas SDM	Orang	30 Orang	30 Orang	Rp 55.000.000	Rp 8.602.900	15,64	17,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran Terpenuhi				Rp 872.187.961	Rp 532.911.015						
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya kinerja aparatur	Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 80.000.000	Rp 34.900.620	43,63	45,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya kinerja aparatur dalam bekerja	Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 240.670.711	Rp 159.895.056	66,44	68,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya kinerja aparatur dalam bekerja	Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 60.000.000	Rp 29.981.100	49,97	51,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran; meningkatnya kenyamanan pegawai dalam bekerja	Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000	Rp 49.698.030	49,70	51,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya pelayanan korban bencana	Jenis Surat Kabar	7 Jenis surat kabar dan majalah	7 Jenis surat kabar dan majalah	Rp 25.517.250	Rp 8.504.000	33,33	35,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Meningkatnya pelayanan kantor	Laporan	1 laporan	1 laporan	Rp 77.500.000	Rp 48.680.000	62,81	64,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya pelayanan kantor	Laporan	1 laporan	1 laporan	Rp 288.500.000	Rp 201.252.209	69,76	71,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah				Rp 17.250.000	0,00						
1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Lapangan Evakuasi Korban Bencana	1 Lapangan Evakuasi Korban Bencana	1 Lapangan Evakuasi Korban Bencana	Rp 17.250.000	0,00	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Administrasi Kebutuhan Terpenuhi				Rp 2.464.898.072	Rp 1.228.373.278						
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		- Surat - Lembar	- 500 surat - 6.000 lembar materai Rp.10.000	- 500 surat - 6.000 lembar materai Rp.10.000	Rp 70.000.000	Rp 51.959.100	74,23	76,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12 Bulan (4 tagihan)	12 Bulan (4 tagihan)	Rp 630.425.512	Rp 315.626.678	50,07	52,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya kesehatan pegawai	Orang	37 Orang	37 Orang	Rp 1.764.472.560	Rp 860.787.500	48,78	50,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Aset BMD				Rp 720.000.000	Rp 272.984.292						
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya kelancaran operasional kantor	Unit	45 Unit kendaraan dinas	45 Unit kendaraan dinas	Rp 570.000.000	Rp 191.992.875	33,68	35,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya operasional dan kinerja aparatur	Unit	60 Unit	60 Unit	Rp 150.000.000	Rp 80.991.417	53,99	55,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					Rp 4.466.753.450							
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi bagi warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota				Rp 1.028.500.000	Rp 459.282.623						
1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana Yang Sah dan Legal	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 150.000.000	Rp 40.500.000	27,00	29,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.01.0004	Sosialisai, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	Orang	500 Orang	500 Orang	Rp 878.500.000	Rp 418.782.623	47,67	49,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada

1.05.03.1.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**- Terlaksananya uji mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana lintas Kabupaten/Kota - Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas - Tersedianya peralatan perlindungan diri bagi keluarga di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota**				**Rp 1.935.420.700**	**Rp 800.856.188**						
1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	Orang	800 Orang	800 Orang	Rp 420.000.000	Rp 282.178.100	67,19	69,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 150.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tersedianya peralatan perlindungan diri bagi keluarga di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Keluarga	3.894 Keluarga	3.894 Keluarga	Rp 780.920.700	Rp 209.520.221	26,83	28,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terbentuknya Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan Prosedur tetap (SOP) untuk pengendalian operasi yang sah dan legal dengan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 584.500.000	Rp 309.157.867	52,98	54,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**- Terlaksananya Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana - Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman - Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Provinsi**				**Rp 1.099.332.750**	**Rp 534.206.434**						
1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 35.000.000	Rp 4.151.000	11,86	13,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	7.025 Orang	7.025 Orang	Rp 919.332.750	Rp 452.305.934	49,20	51,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 110.000.000	Rp 71.749.500	66,23	67,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.03.0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 35.000.000	Rp 6.000.000	17,14	19,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**- Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam - Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) - Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi - Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi - Tersedianya regulasi di daerah untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana) - Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana) - Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota**				**Rp 403.500.000**	**Rp 125.052.086**						

1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	Rp 49.000.000	Rp 34.496.000	70,40	72,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 56.000.000	Rp 15.897.750	28,39	30,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 158.500.000	Rp 61.059.336	38,52	40,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Rp 105.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kab/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	Rp 35.000.000	Rp 13.599.000	38,85	40,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
						Rp 22.413.625.597	**Rp 12.283.846.325**	**54,81**	**58,00**				

Palembang, Agustus 2026
KEPALA PELAKSANA,
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Muhammad Iqbal Alisyahbana, S.STP., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198505082003121001